



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Bupati R. Soedirman No : 92
Jombang 61418
No Telp : 0321. 879913
Website : kominfo@jombangkab.go.id





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Bupati R Soedirman 92 Jombang 61419

Telp. 0321879913 fax. 0321 879913

Email: diskominfo@jombangkab.go.id

Website: kominfo.jombangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor : 188/ 34 /415.23/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi OPD serta untuk memberikan arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Perubahan Tahun 2023, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19)
;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 (Perubahan Ketiga Atas Perbup Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023;
2. Mengadakan koreksi dan perbaikan atas hasil pekerjaan tim baik pada sistematika dokumen, tahapan penyusunan maupun pelaporan penulisan;
3. Memberikan kontribusi pemikiran secara aktif terhadap penyempurnaan pekerjaan penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023;

4. Memastikan konsistensi dan arah pekerjaan berdasarkan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dimaksud Diktum PERTAMA berpedoman pada ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Membebaskan segala pembiayaan pelaksanaan kegiatan Diktum KEDUA pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 2 Agustus 2023

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**



IDA KHUMAIDA, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19740727 199302 2 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 188/082/415.23/2023
TANGGAL : 02 Agustus 2023

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2023**

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Ketua	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
2	Sekretaris	Kabis Statistik dan Persandian
3	Anggota	Kabid Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kabid Aplikasi Teknologi Informasi Perencana Ahli Muda

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : 02 Agustus 2023

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**


IDA KHUMAIDA, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19740727 199302 2 00

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2023 telah selesai disusun sebagaimana mendasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, maka disusunlah Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang yang berisikan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2023.

Jombang, 2 Agustus 2023

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**



IDA KHUMAIDA, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19740727 199302 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampao Dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	60
2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat.....	69
BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	70
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	74
3.3. Perubahan Program dan Kegiatan.....	77
BAB IV PENUTUP.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)	33
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Jombang	58
Tabel	2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	64
Tabel	3.1	Rumusan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	87
Tabel	4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dan setiap tahunnya berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jombang. Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebuah dokumen perencanaan sampai periode satu tahun 2023 dengan penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD pada Tahun 2023.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah, sebagai satu kesatuan dalam satu sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Pembangunan Kerja Daerah (RPKD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, yang menyebutkan bahwa penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 Pemerintah Daerah harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan Perubahan Renja Tahun 2023 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaan berdasarkan wilayah dan fungsi, serta ringkasan pendanaan yang memuat rincian urusan, program dan kegiatan yang pendanaannya dipilah menurut sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Dana Alokasi Khusus serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal OPD sebagai instansi yang baru. Selanjutnya Kepala OPD menetapkan Perubahan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika dengan urusan dan tupoksi sebagai berikut :

a. Urusan

1. Perumusan kebijakan dan program bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan dan program bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;

3. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
7. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
8. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan riil penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan beberapa landasan, yaitu mengacu antara lain pada :

- a. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi;
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- d. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 – 2009;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023;
- k. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 (Perubahan Ketiga Atas Perbup Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023);
- m. Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang;
- n. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 050/9976/415.42/2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 dan Renja PD Tahun 2023;

a. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program / kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan. Perubahan Renja Tahun 2023 dipergunakan sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas dan pokok fungsinya sampai dengan periode tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Per ub a h a n Renja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan tahun 2023 sesuai tugas pokok dan fungsinya;
2. Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

b. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

- **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo
- 2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- **BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**
 - 3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
 - 3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kominfo
 - 3.3. Perubahan Program dan Kegiatan

- **BAB IV PENUTUP**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023 mengacu pada APBD tahun 2023, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang melaksanakan 5 Program, 10 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 13.221.332.759 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dan realisasi anggaran mencapai Rp. 5.773.209.720 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) atau sebesar 43,67%.

Dari Program/kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun capaian pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diarahkan untuk pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah diarahkan untuk pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, untuk meningkatkan konsistensi perencanaan, penganggaran dan evaluasi program Peningkatan Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Sub kegiatan penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipergunakan untuk pemenuhan pelayanan yang menunjang pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan konsistensi perencanaan, penganggaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD tahun 2023 sebesar Rp. 11.060.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya Jumlah dokumen 3 (tiga) dokumen meliputi Renja, Renja Perubahan dan Renstra Perubahan.

Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,00, dengan capaian penyerapan anggaran 13,56% yang dipergunakan untuk Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa Rapat Forum Renja dan Penyusunan Renstra Perubahan dan Renja.

b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD diarahkan untuk pemenuhan pelayanan yang menunjang pemenuhan dokumen evaluasi kinerja dan pelaporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD tahun 2023 sebesar Rp. 16.500.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun sebanyak 5 (lima) laporan, Laporan Renja Triwulan I, II, IIIIV dan LKjiP.

Penyerapan anggaran tribulan II tahun 2023 sebesar Rp. 9.844.000,00 dengan capaian anggaran 59,66% yang dipergunakan untuk koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD terdiri dari Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun 2 (dua) laporan, Laporan Renja Tribulan I dan Tribulan II.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah diarahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi keuangan daerah untuk pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu serta pemenuhan penyusunan laporan keuangan SKPD yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN daerah diarahkan untuk jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD tahun 2023 sebesar Rp. 4.927.422.324,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu sebesar 100 % Penyerapan anggaran sampai tribulan II terealisasi sebesar Rp. 2.501.252.760,00 dan capaian penyerapan anggaran 50,76% yang dipergunakan untuk jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 33 orang selama bulan Januari s.d Juni.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD diarahkan untuk jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan sebanyak 4 dokumen laporan keuangan tribulan I s.d tribulan IV . Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD tahun 2023 sebesar Rp. 209.586.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa 4 dokumen laporan keuangan tribulan I s.d tribulan IV.

Penyerapan anggaran sampai tribulan II terealisasi sebesar Rp. 87.778.000,00 (41.88%) berupa laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan tribulan I s.d tribulan II.

c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD diarahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi keuangan daerah penyediaan dokumen laporan keuangan tahunan SKPD.Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 4.757.500,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa jumlah laporan keuangan akhir tahun tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD.

Penyerapan anggaran sampai tribulan II terealisasi sebesar Rp. 2.275.750,00 dan capaian anggaran 47,83% yang laporan keuangan akhir tahun tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD sebanyak 1 laporan.

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang diarahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah meliputi jumlah pemenuhan kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan

konsultasi SKPD yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan di arahkan untuk pemenuhan jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD tahun 2023 sebesar Rp. 13.805.635,00 maka didapatkan keluaran (output) Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 1 jenis. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 360.000 dan capaian 2,61%. Kegiatan tersebut dipergunakan untuk jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Gedung Kominfo yang disediakan Januari s.d Juni sejumlah 6 paket.

b. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di arahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah meliputi jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 65.246.000,00 maka didapatkan keluaran (output) Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 12 paket. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 23.434.360,00 dengan capaian 35,92% yang dipergunakan untuk penyediaan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 6 paket pada Januari s.d Juni.

c. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor di arahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang meliputi penyediaan makanan dan minuman, BBM dalam kota (peliputan), pembelian bendera dan spanduk.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. , 164.383.900,00 maka didapatkan keluaran (output) jumlah paket bahan logistik yang disediakan sebanyak 12 paket. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 40.312.150,00 dengan capaian anggaran 24,52% yang dipergunakan untuk penyediaan bahan logistik kantor dengan keluaran (output) jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 6 paket pada Januari s.d Juni.

e. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan di arahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang meliputi jumlah paket barang cetakan dan penggandaan.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 51.753.750,00 maka didapatkan keluaran (output) Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan meliputi 5 paket yaitu fotocopy, cetak amplop, cetak kwitansi BBM, cetak stofmap, cetak tata naskah, penjilidan dan cetak box arsip. Sedangkan hasil (outcome) yang

diharapkan adalah pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 13.066.900,00

Capaian penyerapan anggaran tribulan II pada tahun 2023 sebesar 25,25% yang dipergunakan untuk Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan .

f. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di arahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang meliputi jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 11.496.000,00 maka didapatkan keluaran (output) Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 2.520.000,00 dengan capaian 21,92% yang dipergunakan untuk penyediaan barang bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan keluaran (output) jumlah pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 3 dokumen.

g. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD di arahkan untuk jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 66.765.400,00 maka didapatkan keluaran (output) Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 5 laporan. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah persentase pemenuhan administrasi perkantoran Dinas Kominfo sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II sebesar Rp. 16.111.871,00 dengan capaian sebesar 24,13% yang dipergunakan untuk (output) jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk persentase penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi penyediaan jasa konsumsi, sumber daya air dan listrik, dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di arahkan untuk pemenuhan jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dan disediakan.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 251.000.000,00 maka didapatkan keluaran (output) berupa jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan sebanyak 12 laporan. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 147.628.478,00 dengan capaian penyerapan anggaran tribulan II pada tahun 2023 sebesar 58,82% yang dipergunakan untuk jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dan disediakan pada Januari s.d Juni yaitu 6 laporan.

b. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor di arahkan untuk pemenuhan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 284.589.800,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II mencapai Rp. 125.594.868,00 dengan capaian 44,13% yang dipergunakan untuk jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.

5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diarahkan untuk pemenuhan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diarahkan untuk pemenuhan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah meliputi

jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 42.110.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 1 unit . Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah prosentase Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 6.975.500,00 dengan capaian sebesar 16,56% yang berupa Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 1 unit.

- b. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diarahkan untuk pemenuhan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah meliputi jumlah kendaran dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 86.550.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa jumlah kendaran dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 17 unit. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah persentase Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 21.777.900,00 dengan capaian 25,16%.

- c. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang diarahkan untuk pemenuhan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah kantor dinas yang meliputi jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Dinas Kominfo yang dipelihara.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 50.199.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Dinas Kominfo yang dipelihara 2 unit . Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 4.823.380 dengan capaian sebesar 90,39% yang berupa jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Dinas Kominfo yang dipelihara sebanyak 2 unit di Gedung Kominfo dan Gedung Radio SJFM.

- d. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi yang meliputi pelayanan pemeliharaan AC, Komputer, Laptop dan printer.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 48.430.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 2 unit. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah persentase Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 26.186.500,00 dengan capaian sebesar 45,93% yang berupa Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik diarahkan untuk pemenuhan bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik, dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan :

- 1). Kegiatan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah diarahkan untuk penyebaran informasi publik kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pengelolaan Media Komunikasi Publik diarahkan untuk penyebaran media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi melalui 5 dokumen yang meliputi Inteligent Media Management (IMM), (2) Ikatan Layanan Masyarakat (ILM), (3) Warung Pojok (Warjok) lokal serta Bulaga, (4) Goes To School dan (5) Publikasi Media Elektronik.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 375.502.500,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa Jumlah dokumen hasil pelaksanaan dan pengelolaan media komunikasi publik sebanyak 5 dokumen. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik sebesar 3%. Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II mencapai Rp. 255.155.500,00. Capaian penyerapan anggaran pada triwulan II tahun 2023 sebesar 67,95%

- b. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

SubKegiatan Pelayanan Informasi Publik diarahkan untuk kegiatan PPID, Sosialisasi Lapor SP4N dan Sosialisasi serta Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp.160.779.008,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik.

Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik sebesar 3.2%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 121.908.508,00. Capaian penyerapan anggaran tribulan II pada tahun 2023 sebesar 24,18%.

c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

SubKegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas diarahkan untuk publikasi kegiatan pemerintah kabupaten Jombang dengan mitra kerjasama media cetak dan elektronik informasi pembangunan daerah, sosialisasi kegiatan pemerintah kabupaten Jombang melalui social media dan sosialisasi berupa Ngopi bareng pegiat Media Social.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 1.596.686.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa Jumlah dokumen kemitraan dengan Masyarakat media dan komunitas dalam mendesiminasikan informasi program dan kebijakan. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik sebesar 3%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 538.200.000,00. Capaian penyerapananggaran tribulan II pada tahun 2023 sebesar 65,73%.

- d. Sub kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan

Sub kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan untuk pengadaan sarana prasarana dan pemeliharaan di radio SJFM meliputi :

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 104.710.042,00 maka didapatkan keluaran (output) jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran Rp. 86.695.000,00, capaian anggaran yaitu 82.80%.

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika diarahkan untuk pemenuhan bidang aplikasi informatika , dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan :

- 1). Kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/kota diarahkan untuk fasilitasi koneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah pada seluruh OPD di Kabupaten Jombang, pemeliharaan jaringan intra dan penataan Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- a. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama domain dan Sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama domain dan Sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diarahkan untuk penataan subdomain sesuai standar penyelenggaraan subdomain.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 16.300.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebanyak 100% dan Persentase Sub domain sesuai

standart Penyelenggaraan Sub Domain sebanyak 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 0. Capaian penyerapan anggaran tribulan II pada tahun 2023 sebesar 0% dengan Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 2 dokumen yaitu 1 dokumen pengawasan sub domain dan 1 dokumen penatalaksanaan sub domain.

b. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah diarahkan untuk penataan koneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah .

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 2.537.938.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa Jumlah sistem jaringan intra Pemerintah Daerah.

Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebanyak 100% dan Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain sebanyak 100%. Penyerapan anggaransampai dengan tribulan II mencapai Rp. 820.132.245,00. Capaian penyerapan anggaran tribulan II pada tahun 2023 sebesar 32.31% dengan jumlah sistem jaringan intra Pemerintah Daerah di seluruh OPD di Kabupaten Jombang dan 6 titik.

2). Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diarahkan untuk pengembangan Aplikasi yang terintegrasi yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diarahkan untuk dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 211.306.800,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah Persentase Aplikasi yang terintegrasi sebanyak 20% sesuai dengan target. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 4.550.000,00 atau 2.15%.

b. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah

Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah diarahkan untuk penataan koneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah .

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 784.941.000,00 maka didapatkan keluaran (output) berupa jumlah pusat data pemerintahan Daerah yang dikelola sebanyak 1 unit.

Pemenuhan Pusat Data

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
1	Pusat data aman dari bencana, mudah diakses dan mudah melakukan pengembangan/pembangunan		√	
2	Perancangan dan pembangunan pusat data sesuai dengan standar topologi yang dipilih sesuai kebutuhan	√		
3	Penyediaan jalur supply utility dan logistik	√		
4	Penyediaan bandwidth untuk komunikasi yang diperlukan dan memiliki jalur alternatif guna menghindari kepadatan lintas data serta mencegah kegagalan satu jalur	√		
5	Penyediaan sistem monitoring lingkungan pusat (temperatur, kelembapan, asap, kebakaran, kebocoran air, dan tegangan listrik)	√		
6	Mempunyai dan menjalankan standar operasional prosedur untuk operasi dan perawatan	√		
7	Memiliki rencana keberlangsungan usaha dan rencana pemulihan bencana yang komprehensif serta proses pemulihan bencana yang cepat dan adaptif		√	
8	Ruang masuk yang dipakai sebagai antar-muka antara sistem pengkabelan pusat data dan pengkabelan antar bangunan	√		
9	Lokasi untuk perangkat penyedia akses dan titik demarkai dan juga antar muka dengan sistem pengkabelan	√		

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
10	Area distribusi utama (lokasi main cross connect, router inti dan switches untuk infrastruktur LAN dan SAN)	√		
11	Area distribusi horizontal (lokasi distribusi untuk pengkabelan ke area distribusi perangkat)	√		
12	Area distribusi perangkat (ruang yang dialokasikan untuk perangkat akhir termasuk sistem komputer dan perangkat telekomunikasi)	√		
13	Area distribusi zona (terletak antara area distribusi horizontal dan area distribusi perangkat)	√		
14	Lokasi bangunan berada pada lokasi yang aman bencana alam dan mempunyai akses jalan yang cukup dan fasilitas parkir	√		
15	Bangunan ruang komputer tidak berada di bawah area perpipaan kecuali memiliki sistem pengendali air	√		
16	Jendela ruang komputer yang menghadap ke sinar matahari ditutup	√		
17	Memiliki area bongkar muat yang memadai untuk menangani pengantaran barang/peralatan	√		
18	Memiliki sistem pengkondisian udara, proteksi kebakaran, kelistrikan yang sama dengan standar ruang komputer		√	
19	Kontrol akses memiliki pengamanan fisik disetiap jendela yang memungkinkan akses langsung ke pusat data	√		
20	Setiap sumber daya manusia di pusat data memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup terhadap keamanan fisik pusat data	√		
21	Pengamanan pusat data selama 24 jam dengan jumlah petugas paling sedikit 2 orang per shift		√	
22	Terdapat perangkat sistem pemantau visual yang berfungsi untuk memantau dan merekam	√		
23	Menggunakan sistem akses elektronik dan sistem pengawasan yang dikendalikan dengan mekanisme otentikasi	√		
24	Setiap tamu/pengunjung memiliki izin dan dilengkapi dengan tanda masuk serta tanda penhenal untuk dapat masuk		√	
25	Jumlah dan lokasi pintu darurat kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	√		
26	Pintu darurat kebakaran harus dapat dibuka kearah luar	√		
27	Lampu darurat dan tanda keluar diletakkan pada lokasi sesuai ketentuan		√	

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
28	Lampu darurat, tanda keluar darurat, dan titik kumpul darurat diletakkan pada lokasi sesuai ketentuan		√	
29	Dinding dan pintu ke ruang komputer, ruang mekanikal dan kelistrikan, ruang telekomunikasi dan kawasan kritikal lainnya memiliki tingkat terbakar (fire-rating) sesuai dengan peraturan		√	
30	Ruang komputer diproteksi dengan sistem pemadam kebakaran dan deteksi asap		√	
31	Seluruh sistem deteksi asap bangunan diintegrasikan ke satu alarm bersama		√	
32	Sistem pemadam kebakaran otomatis diaktifkan secara manua		√	
33	Tersedia catatan pemeliharaan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan deteksi api dan pemadaman untuk keperluan pemeriksaan		√	
34	Tersedia bukti pelatihan staf pada simulasi pengendalian kebakaran		√	
35	Pemadam kebakaran ditempatkan sesuai ketentuan peraturan		√	
36	Semua tanda peringatan kebakaran ditempatkan pada posisinya sesuai ketentuan peraturan		√	
37	Seluruh sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran didesain dan dipasang oleh petugas yang memiliki kualifikasi dan didesain sesuai standar internasional/nasional atau regulasi nasional		√	
38	Bangunan dilengkapi dengan sistem proteksi petir		√	
39	Kabel daya masuk ke dalam bangunan dan diterminasi di ruang penyambungan listrik yang andal yang berisikan seluruh penyambungan dan pengukuran yang penting		√	
40	Daya yang tersedia dari penyedia listrik utama paling sedikit 20% lebih besar dari proyeksi beban puncak dimana pusat data berada		√	
41	Tersedia catu daya listrik alternatif (seperti generator) dengan kapasitas yang memadai untuk operasional pusat data paling sedikit 6 (enam) jam selama kejadian gangguan listrik utama		√	
42	Perangkat pusat data harus diproteksi dengan UPS atau catu daya cadangan lainnya		√	
43	Kapasitas penyimpanan energi UPS atau catu daya cadangan lainnya memadai untuk memasok beban pusat data sehingga cukup waktu bagi catu daya alternatif mencapai keadaan tunak (steady state) untuk memikul beban pusat data		√	

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
44	Kapasitas UPS lebih besar dari proyeksi beban puncak perangkat pusat data. Kapasitas beban rata-rata tidak lebih besar dari 80% kapasitas UPS		√	
45	UPS memiliki sistem pelaporan dan pemantauan kinerja serta sistem peringatan		√	
46	Ruang pusat data memiliki terminal pembumian (grounding) tembaga kurang dari 1 Ohm	√		
47	Ruang komputer dijaga dan dikendalikan temperatur dengan suhu antara 18-24 °C	√		
48	Ruang komputer dijaga dan dikendalikan kelembaban ruangnya dengan kelembaban antara 50-55%	√		
49	Peralatan pengkondisian udara dihubungkan ke catu daya utama dan didukung oleh catu daya alternatif		√	
50	Seluruh pengkabelan interior dengan tipe tidak mudah terbakar		√	
51	Setiap rak memiliki akses ke sistem saluran kabel, di atas atau di bawahnya, yang memungkinkan kabel-kabel dapat ditata secara baik antar rak	√		
52	Kabel daya satu fase dan kabel data tembaga harus dipisahkan paling sedikit 20 (dua puluh) cm	√		
53	Kabel daya tiga fase dan kabel data tembaga harus dipisahkan paling sedikit 60 (enam puluh) cm	√		
54	Kabel yang melewati dinding dilindungi terhadap bahaya api sesuai ketentuan peraturan		√	
55	Kabel tidak diletakkan di pintu, lantai, atau digantung antar rak		√	
56	Setiap kabel memiliki label identifikasi yang unik pada kedua ujung awal dan akhir		√	
57	Setiap rak peralatan memiliki label identifikasi		√	
58	Kabel input telekomunikasi eksternal dihubungkan di area atau ruang telekomunikasi tersendiri		√	
59	Kabel komunikasi tembaga dari luar gedung diproteksi dengan peredam tegangan lebih sebelum ke ruang komputer		√	
60	Memiliki komponen kapasitas dasar dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sesuai kebutuhan		√	
61	Memiliki tingkat availability 99,671%		√	
62	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 28,8 jam pertahun		√	

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
63	Memiliki komponen kapasitas redundan dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sesuai kebutuhan		√	
64	Memiliki tingkat availability 99,749%		√	
65	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 22 jam pertahun		√	
66	Memiliki komponen kapasitas redundan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sedemikian hingga pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan di setiap komponen kritikal pusat data tanpa harus mematikan operasi pusat data. Satu jalur distribusi tersebut dalam kondisi aktif dan satu jalur distribusi lainnya dalam kondisi siaga (standby).		√	
67	Memiliki kemampuan untuk mendeteksi kegagalan, mengisolasi dampak kegagalan dan melakukan perawatan sehingga layanan pusat data tetap bekerja dengan baik		√	
68	Memiliki tingkat availability 99,982%		√	
69	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 1,6 jam pertahun		√	
70	Memiliki komponen kapasitas redundan dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sedemikian hingga pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan di setiap komponen kritikal pusat data tanpa harus mematikan operasi pusat data. Kedua jalur distribusi tersebut dalam kondisi aktif.		√	
71	Memiliki tingkat availability 99.995%		√	
72	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 2.4 menit pertahun.		√	
73	Memastikan power management berjalan dengan baik		√	
74	Memastikan desain dan manajemen aliran udara dan sistem pendingin berjalan dengan baik		√	
75	Memastikan peralatan mekanik dan elektrik bekerja pada rentang optimum operasi baik dalam hal rentang daya dan rentang temperatur		√	
76	Menggunakan peralatan TIK dan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan dan power density Pusat Data, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan pengembangan Pusat Data ke depannya		√	
77	Mengintegrasikan kontrol optimasi manajemen energi pada seluruh peralatan TIK dan keseluruhan fasilitas Pusat Data		√	

Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah Persentase Aplikasi yang terintegrasi sebanyak 20% sesuai dengan target. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 174.254.864,00 atau 22.20%.

- d. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik diarahkan untuk sistem elektronik dibangun/ dikembangkan yang sesuai dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 127.243.387,00 maka didapatkan keluaran (output) berupa jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah Persentase Aplikasi yang terintegrasi sebanyak 20% sesuai dengan target. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 127.243.387 atau 28.30%.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- 1). Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral diarahkan untuk penyusunan dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang melalui sub kegiatan :

- a. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Koordinasi pengumpulan dan pengolahan data sektoral Kabupaten Jombang diarahkan untuk rapat koordinasi dan pengolahan data.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 231.204.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisis dan diseminasi data statistik sektoral sebanyak 9 dokumen .

Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisis dan diseminasi data statistik sektoral berupa dokumen laporan koordinasi pelaksanaan penyusunan data/informasi statistik sektoral dan infografis (3 kali), Perhitungan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) sebanyak 3 kali dan Perhitungan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) (3 kali)

Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 59.950.000,00 dengan capaian 25.93%.

b. Subkegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

Membangun Metadata Statistik Sektoral diarahkan untuk pemenuhan data statistik sektoral yang dikelola.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 100.246.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun.

Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang berupa pengumpulan Dokumen Infografis Data Sektoral, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP). Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 90.238.000 atau 4,69%.

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan :

a. Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diarahkan untuk sistem elektronik yang ada pada Kabupaten Jombang dilakukan pengamanan informasi.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 135.938.900,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi.

Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah Persentase Sistem elektronik yang memiliki keamanan informasi dengan target pada 2023 yaitu 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan II mencapai Rp. 17.706.118 dengan capaian 13.03%.

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Program Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran kinerja (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s.d Tahun 2023
			K	Rp	K	K		K Rp	K
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	300%	200%	100 %	100 %	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	300%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	3 dokumen	N/A	3 dokumen	2 dokumen	75%	2 dokumen	2 dokumen
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	N/A	2 laporan	2 laporan	50%	2 laporan	2 laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	300%	200%	100 %	100 %	100%	100%	100%
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	33 orang	N/A	14 kali	14 kali	100%	14 kali	14 kali
	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan	4 dokumen	N/A	11 kegiatan	11 kegiatan	100%	11 kegiatan	11 kegiatan
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	200 %	N/A	100 %	100 %	100%	100%	100%
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	N/A	3 lokasi	3 lokasi	100%	3 lokasi	3 lokasi

--	--

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) tahun 2023	Perkiraan Realisasi Vapaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023
				K		K	K		K Rp	K
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	12 paket	N/A	3 lokasi	3 lokasi	100%	3 lokasi	3 lokasi
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	N/A	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	N/A	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6 media	N/A	3 media	3 media	100%	3 media	3 media
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 laporan	N/A	3 kali	3 kali	100%	3 kali	3 kali
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	200 %	N/A	100 kali	100 %	100%	100%	100%
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terfasilitasi	6 lokasi	N/A	3 lokasi	3 lokasi	100%	3 lokasi	3 lokasi
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	10 jenis	N/A	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	5 jenis
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	200 %	N/A	100 %	100 %	100%	100%	100%
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit						
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	17 unit						
	3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	N/A	2 lokasi	2 lokasi	100%	2 lokasi	2 lokasi 18%
	4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	63 unit	N/A	3 lokasi	3 lokasi	100%	3 lokasi	3 lokasi 44%

--	--

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20220	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun N-2 (2021)	Realisasi Renja tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Vapaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (5)
			K		K	K		K Rp	K
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	123 I-PIKP	N/A	81,6 (sedang)	62 (sedang)	100%	81,6	81,6 54%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan informatika	168 IKM	N/A	85,81 baik	84,5 (baik)	100%	85,81	85,81
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	200 %	N/A	100 %	100%	100	100 54%
	1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi	10 media	N/A	5 media	100%	5	5 52%
			Jumlah program siaran radio per minggu	14 program	N/A	7 program	100%	7	7
	2	Pelayanan Informasi Publik	Prosentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP PPID	200 %	N/A	100 %	100%	100	100 41%
			Prosentase pengaduan di SP4N LAPOR yang ditindaklanjuti	200 %	N/A	100 %	100%	100	100
			Jumlah desa yang terbentuk KIM baru dan dilaksanakan pembinaan	10 desa	N/A	5 desa	100%	5 desa	5 desa
	3	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah mitra kerjasama media cetak dan elektronik informasi pembangunan daerah	90 mitra kerjasama	N/A	45 mitra kerjasama	100%	45 mitra kerjasama	45 mitra kerjasama 56%
			Jumlah pengikut akun resmi pemerintah daerah di media sosial	25,000 pengikut	N/A	12,000 pengikut	100%	12.000 pengikut	12.000 pengikut
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Level 4 indikator terkelola	N/A	2 Level	2 level	100%	level 2	level 2 39%
		Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	36 indikator terkelola	N/A	18 indikator terkelola	18 indikator terkelola	100%	18 indikator terkelola	18 indikator terkelola
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	200 %	N/A	100 %	100%	100%	100% 40%
			Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain	167 %	N/A	67 %	100%	67%	67%

--	--

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20220	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Tahun N-2 (2021)	Realisasi Renja tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Vapaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (5)
				K		K	K		K Rp	K
	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah subdomain sesuai standar penyelenggaraan subdomain	107 subdomain	N/A	43 Subdomain	43 subdomain	100%	43 sub domain	43 sub domain 26%
	2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah terkoneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah	136 titik	N/A	68 titik	68 titik	100%	68	68 40%
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Aplikasi yang terintegrasi	40 %	N/A	20 %	20 %	100%	25	25 37%
	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan SPBE pada aspek TIK yang disusun	6 dokumen	N/A	2 dokumen	2 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen 17%
	2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pusat data sesuai standar	45 %	N/A	25 %	25 %	100%	20%	20% 37%
	3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah sistem elektronik dibangun/ dikembangkan	9 aplikasi	N/A	4 aplikasi	4 aplikasi	100%	5 aplikasi	5 aplikasi 40%
Urusan Statistik										
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	200 %	N/A	100 %	100 %	100%	100%	100% 30%
			Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	7 (baik) IPP	N/A	3,164 IPP	3,52 IPP	100%	3,164	3,164
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang	6 dokumen	N/A	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen 30%
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi pengumpulan dan pengolahan data sektoral Kabupaten Jombang	18 kali	N/A	9 kali	9 kali	100%	9 kali	9 kali 29%
	2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola	56 data sektoral	N/A	28 data sektoral	28 data sektoral	100%	28 data sektoral	28 data sektoral 33%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	75 %	N/A	50 %	50 %	100%	50%	50% 22%
	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi		Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi	75 %	N/A	50 %	50 %	100%	50%	50% 22%
	1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengamanan informasi	5 sistem elektronik	N/A	2 sistem elektronik	2 sistem elektronik	100%	3 sistem elektronik	3 sistem elektronik 22%

--	--

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam IKK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tahun 2022, pelaksanaan indikator kinerja disesuaikan dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing tupoksi sebagai berikut :

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
 - Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase Jumlah OPD di Kabupaten Jombang terhubung dengan aksesinternet dan akses internet berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo 100% meliputi 53 OPD. Jaringan Intra Pemerintah Daerah menggunakan koneksi Fiber Optic (FO).
 - Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo Persentase Jumlah OPD di Kabupaten Jombang yang menggunakan akses internet berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo 100% meliputi 53 OPD dengan total bandwidth 1 Gigabyte.
 - Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yangdisediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah. Penyediaan bandwidth yang cukup untuk OPD yang bisa digunakan untukakes internet, berbasis suara, video, teks data dan sinyal
2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
 - Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negarasesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 Layanan publik di Pemkab Jombang yang dimanfaatkan secara online dan terintegrasi sebagai berikut :

(1) SIPD; (2) e-sulash; (3) JOS; (4) SIPD; (5) SIPD Penatausahaan Keuangan; (6) SPSE; (7) SIBAJA; (8) SIAP-ASN; (9) SRIKANDI; (10) SIMDA BMD; (11) e-AUDIT; (12) e-SAKIP; (13) e-OFFICE; (14) LAPOR SPAN; (15) SATU DATA; (16) INTUISI; (17) JDIH; (18) SIRINDUNONA; (19) SIMPADI

dan (20) SABDOPALON.

- Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar

17 OPD yang memiliki web sesuai standart x 100% = 32.07%
53 OPD yang ada di Kabupaten Jombang

Saat ini situs web OPD di Kabupaten Jombang dengan subdomain namaopd.jombangkab.go.id dimiliki 18 OPD dari 61 OPD yaitu (1) bkpsdm.jombangkab.go.id; (2) bapenda.jombangkab.go.id; (3) bappeda.jombangkab.go.id; (4) perizinan.jombangkab.go.id; (5) disdagrin.jombangkab.go.id; (6) sikembang.jombangkab.go.id; (7) disdikbud.jombangkab.go.id; (8) pupr.jombangkab.go.id; (9) dlh.jombangkab.go.id; (10) dukcapil.jombangkab.go.id; (11) dinkes.jombangkab.go.id; (12) inspektorat.jombangkab.go.id; (13) plosos.jombangkab.go.id; (14) plosos.jombangkab.go.id; (15) jdih.jombangkab.go.id; (16) sibaja.jombangkab.go.id dan (17) rsud.jombangkab.go.id

OPD yang belum memiliki website sesuai dengan penamaan domain sesuai dengan PERMEN no 28 Tahun 2006 tentang domain go.id difasilitasi dalam portal website Pemkab Jombang dengan alamat www.jombangkab.go.id. Halaman website jombangkab memiliki halaman utama, terdapat pula subpage 53 OPD yang dikelola oleh masing-masing OPD Kabupaten Jombang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

53 PD mengaplikasikan aplikasi umum dan khusus x 100% = 100%
53 PD yang ada di Kabupaten Jombang

Aplikasi umum dan khusus meliputi (1) LAPOR SP4N; (2) SIPD; (3) JDIH; (4)

SPSE dan (5) SRIKANDI telah digunakan oleh 53 OPD sehingga tercapai 100%.

- Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik

20 layanan publik & administrasi pemerintahan x 100% = 100%
20 layanan

Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan tercapai 100%. Layanan SPBE yang tercantum sebagai berikut:

REKAPITULASI DATA LAYANAN PUBLIK DAN LAYANAN PUBLIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SESUAI DOKUMEN PROSES BISNISTAHUN 2022

NO	LAYANAN	ADA/TIDAK ADA	NAMA APLIKASI	UNIT KERJA/PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				
1	LAYANAN PERENCANAAN	ADA	1 SIPD	BAPPEDA
		ADA	2 e-SULASH	BPKAD dan BAG. PEMBANGUNAN
		ADA	3 JOS	BAPPEDA, BAG PEMBANGUNAN
2	LAYANAN PENGANGGARAN	ADA	4 SIPD	BPKAD
3	LAYANAN KEUANGAN	ADA	5 SIPD PENATAUSAHAAN KEUANGAN	BPKAD
4	LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	ADA	6 SPSE	BAG. PBJ
			7 SIBAJA	
5	LAYANAN KEPEGAWAIAN	ADA	8 SIAP-ASN	BKPSDM
6	LAYANAN KEARSIPAN DINAMIS	ADA	9 SRIKANDI	DISPERSIP
7	LAYANAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH	ADA	10 SIMDA BMD	BPKAD
8	LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH	ADA	11 E-AUDIT	INSPEKTORAT
9	LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	ADA	12 E-SAKIP	BAG. ORGANISASI
10	LAYANAN KINERJA PEGAWAI	ADA	13 E-OFFICE	BAG. ORGANISASI
11	LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK	ADA	14 LAPOR SP4N	DISKOMINFO

NO	LAYANAN	ADA/TIDAK ADA	NAMA APLIKASI	UNIT KERJA/PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
12	LAYANAN DATA TERBUKA	ADA	15 SATU DATA	DISKOMINFO
		ADA	16 INTUISI	DINSOS
13	LAYANAN JDIH	ADA	17 JDIH	BAG. HUKUM
LAYANAN PUBLIK				
14	LAYANAN PUBLIK 1 (LAYANAN PERIZINAN)	ADA	18 SIRINDUNONA	DPMPTSP
15	LAYANAN PUBLIK 2 (LAYANAN PAJAK DAERAH)	ADA	19 SIMPADU	BAPENDA
16	LAYANAN PUBLIK 3 (LAYANAN DESA)	ADA	20 SABDOPALON	DPMPD

KETERANGAN :

JUMLAH APLIKASI LAYANAN PEMERINTAHAN : 17

JUMLAH APLIKASI LAYANAN PUBLIK : 3

- Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasipemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik

$$20/20 \times 100\% = 100\%$$

DAFTAR LAYANAN SPBE
LAYANAN PUBLIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
YANG MEMANFAATKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
TAHUN 2022

NO	LAYANAN	YA/TIDAK MEMANFAATKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK	NAMA APLIKASI	UNIT KERJA/PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				
1	LAYANAN PERENCANAAN	YA	1 SIPD	BAPPEDA
		YA	2 e-SULASH	BPKAD dan BAG. PEMBANGUNAN
		YA	3 JOS	BAPPEDA, BAG. PEMBANGUNAN
2	LAYANAN PENGANGGARAN	YA	4 SIPD	BPKAD
3	LAYANAN KEUANGAN	YA	5 SIPD PENATAUSAHAAN KEUANGAN	BPKAD
4	LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	YA	6 SPSE	BAG. PBJ
		YA	7 SIBAJA	
5	LAYANAN KEPEGAWAIAN	YA	8 SIAP-ASN	BKPSDM
6	LAYANAN KEARSIPAN DINAMIS	YA	9 SRIKANDI	DISPERSIP
7	LAYANAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH	YA	10 SIMDA BMD	BPKAD
8	LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH	YA	11 E-AUDIT	INSPEKTORAT
9	LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	YA	12 E-SAKIP	BAG. ORGANISASI
10	LAYANAN KINERJA PEGAWAI	YA	13 E-OFFICE	BAG. ORGANISASI
11	LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK	YA	14 LAPOR SP4N	DISKOMINFO
12	LAYANAN DATA TERBUKA	YA	15 SATU DATA	DISKOMINFO
		YA	16 INTUISI	DINSO
13	LAYANAN JDIH	YA	17 JDIH	BAG. HUKUM

LAYANAN PUBLIK				
14	LAYANAN PUBLIK 1 (LAYANAN PERIZINAN)	YA	18 SIRINDUNONA	DPMPSTP
15	LAYANAN PUBLIK 2 (LAYANAN PAJAK DAERAH)	YA	19 SIMPADU	BAPENDA
16	LAYANAN PUBLIK 3 (LAYANAN DESA)	YA	20 SABDOPALON	DPMPD

- Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

26 Sistem Elektronik $\frac{\text{26 sistem elektronik}}{\text{26 Sistem Elektronik}} \times 100\% = 100\%$
--

**DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK YANG TERDAFTAR SESUAI KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2022**

NO	OPD	NAMA SISTEM ELEKTRONIK		KETERANGAN
1	BAPPEDA	1	SIPD	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
2	BPKAD	2	E-SULASH	Sistem Informasi Usulan Standar Harga
3	BPKAD	3	SIPD Keuangan/Penatausahaan	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
4	BAG. PBJ	4	SPSE	Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		5	SIBAJA	Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
5	BKDPP	6	SIAP-ASN	Sistem Informasi Penataan ASN
6	BAG. ORGANISASI	7	E-SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		8	E-OFFICE	Sistem Aktivitas Kepegawaian (TPP)
7	INSPEKTORAT	9	E-AUDIT	sistem pengawasan internal pemerintah Kabupaten

8	BAG. PEMBANGUNAN	10	JOS	Jombang One System (aplikasi integrasi perencanaan, sistem penganggaran, manajemen akuntabilitas kinerja dan keuangan)
9	DISKOMINFO	11	SATUDATA	Pusat Data Kabupaten Jombang
10	BAG. HUKUM	12	JDIH	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
11	DPMPTSP	13	SIRINDUNONA	Sistem aplikasi pelayanan perizinan non berusaha
12	BAPENDA	14	SIMPADDU	Sistem Informasi Pajak Daerah Online
13	DPMD	15	SABDOPALON	Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Desa
14	DISPENDUKCAPIL	16	DUKCAPIL/YAONAH	Layanan Online Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15	DLH	17	SILAJANG	Sistem Informasi Laboratorium Jombang
16	PERTANIAN	18	ADAPTIF	Sistem Informasi Tanam dan Panen di Kabupaten Jombang
		19	SIMFONI	Sistem Informasi GAPOKTAN
17	PUPR	20	SIMENARA	Sistem Informasi Menara Telekomunikasi Berbasis Geografis (Peta)
18	DINKES	21	SIDAVID	Sistem Informasi Data Covid
19	BAG. TATA PEMERINTAHAN	22	LAKSAMANA	Aplikasi Layanan Kerjasama Jombang
20	DINSOS	23	INTUISI	Sistem Informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan (SIKS-NG)
21	DISPERPUSIP	24	INLIS LITE	Integrated Library System (Layanan Anggota Perpustakaan)

		25	SRIKANDI	Layanan Persuratan dan Kearsipan
22	DISKOPUM	26	BLONJO	Aplikasi Belanja Produk UMKM

- Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah

Aplikasi yang terintegrasi dengan sistem layanan pemerintah yaitu 40% sebagai berikut:

8 layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terhubung API	
	$\times 100\% = 40\%$
20 layanan publik dan layanan administrasi	

DAFTAR APLIKASI LAYANAN PUBLIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAHAN (API) DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022

NO	JENIS LAYANAN	NAMA APLIKASI	KETERANGAN APLIKASI	PERANGKAT DAERAH
1	LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	E-OFFICE	- Sistem layanan aktivitas pegawai - Terintegrasi dengan Siap ASN	DISKOMINFO, BAG. ORGANISASI
		JOS	- Sistem aplikasi yang mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran, manajemen akuntabilitas kinerja dan keuangan; - Terintegrasi dengan SIPD	DISKOMINFO, BAPPEDA, DAN BAGIAN PEMBANGUNAN
		INTUISI	- Sistem Informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan (SIKS-NG)	DINSOS

NO	JENIS LAYANAN	NAMA APLIKASI	KETERANGAN APLIKASI	PERANGKAT DAERAH
			- Terintegrasi dengan SIAK	
		e-SULASH	- Sistem Informasi Usulan Standar Harga - Terintegrasi dengan SIPD	DPKAD dan BAG. PEMBANGUNAN
		SIAP ASN	- Sistem administrasi layanan kepegawaian asn - Terintegrasi dengan e-office	BKPSDM
2	LAYANAN PUBLIK	SIMPADU	- Sistem Layanan Pajak Terpadu - Terintegrasi dengan Siak, Sirindunona dan bank jatim	DPMPTSP - DISPENDUKCAPIL
		SABDOPALON	- Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Online - Terintegrasi dengan SIAK, INTUISI	DISKOMINFO, DPMD, DINSOS
		SIRINDUNONA	- Sistem Layanan Perizinan - Terintegrasi dengan SIAK, Simpadu	DISKOMINFO, DPMPTSP dan BAPENDA

KETERANGAN :

- JUMLAH LAYANAN PUBLIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMRINTAHAN DI KABUPATEN JOMBANG ADALAH 20 APLIKASI
- JUMLAH LAYANAN PUBLIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI DI KABUPATEN JOMBANG YANG SUDAH TERINTEGRASI API ADALAH 8 APLIKASI

- Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah, adalah 53 OPD. Seluruh OPD menggunakan layanan pusat data yang tersentral di Dinas Kominfo.
- Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)

$$\frac{32}{53} \times 100\% = 60,37\%$$

DAFTAR SIKLUS PEMBARUAN DATA
ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (OPD)
TAHUN 2022

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA	SIKLUS PEMBARUAN DATA
1	2	3	4	5
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Indeks Profesionalitas ASN	3 bulan
		2	Jumlah ASN	3 bulan
		3	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	3 bulan
		4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	3 bulan
		5	Jumlah Non ASN	3 bulan
		6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan	3 bulan
		7	Nilai Sistem Merit	3 bulan
		8	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 bulan
		9	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	3 bulan
		10	Persentase Pelanggaran Pegawai	3 bulan
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	Data Potensi Konflik Ipoleksosbud	3 bulan
		12	Jumlah Kasus Unjuk Rasa	3 bulan
		13	Jumlah Korban Pertikaian Antar Warga	3 bulan
		14	Jumlah Pengungsi Akibat Pertikaian Antar Warga	3 bulan
		15	Jumlah Pengungsi Akibat Unjuk Rasa	3 bulan
		16	Jumlah Pertikaian Antar Warga	3 bulan
		17	Kerugian Material Akibat Pertikaian Antar Warga	3 bulan
		18	Kerugian Material Akibat Unjuk Rasa	3 bulan
		19	Korban Unjuk Rasa	3 bulan
		20	Ormas dan LSM	3 bulan
		21	Partai politik	3 bulan
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22	Indeks Risiko Bencana	3 bulan
		23	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	3 bulan
		24	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	3 bulan
		25	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3 bulan
		26	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	3 bulan
4	Badan Pendapatan Daerah	27	Jumlah dan jenis Pajak Daerah	3 bulan
5	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah	28	Indeks Pengelolaan Aset	3 bulan
		29	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	3 bulan

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA	SIKLUS PEMBARUAN DATA
1	2	3	4	5
		30	Opini BPK terhadap laporan keuangan	3 bulan
		31	Penetapan APBD	3 bulan
		32	Perkembangan APBD	3 bulan
		33	Presentase SILPA	3 bulan
		34	Presentase SILPA terhadap APBD	3 bulan
6	BAPPEDA	35	Indeks Gini	3 bulan
		36	Indeks Good Governance (IGG)	3 bulan
		37	Indeks Kesalehan Sosial	3 bulan
		38	Indeks Kesehatan	3 bulan
		39	Indeks Pembangunan Manusia	3 bulan
		40	Indeks Perencanaan	3 bulan
		41	Inflasi Kabupaten	3 bulan
		42	Konsumsi per kapita yang disesuaikan	3 bulan
		43	PDRB ADHB	3 bulan
		44	PDRB ADHK	3 bulan
		45	PDRB Per Kapita	3 bulan
		46	Pertumbuhan Ekonomi	3 bulan
		47	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	3 bulan
		48	Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun)	3 bulan
		49	Tingkat kemiskinan	3 bulan
		50	Tingkat Pengangguran Terbuka	3 bulan
		51	Umur Harapan Hidup/UHH (Tahun)	3 bulan
8	BAGIAN ORGANISASI	52	Hasil	3 bulan
		53	Hasil Antara Perubahan	3 bulan
		54	Indeks Kepuasan Masyarakat	3 bulan
		55	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	3 bulan
		56	Indeks Pelayanan Publik	3 bulan
		57	Indeks Reformasi Birokrasi	3 bulan
		58	Pengungkit (Pemenuhan)	3 bulan
		59	Reform	3 bulan
9	BAGIAN BARANG JASA	60	Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa	3 bulan
10	DISPORAPAR	61	Jumlah cabang olahraga berprestasi provinsi/nasional	3 bulan
		62	Jumlah gedung olahraga	3 bulan
		63	Jumlah klub olahraga	3 bulan
		64	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional	3 bulan
		65	Kunjungan wisata	3 bulan
		66	PAD Sektor Pariwisata	3 bulan
		67	Rata-rata lama wisatawan tinggal	3 bulan

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA	SIKLUS PEMBARUAN DATA
1	2	3	4	5
11	DISPENDUKCAPIL	68	Jumlah penduduk	3 bulan
		69	Kepadatan penduduk	3 bulan
		70	Kepemilikan akta kelahiran (Akta kelahiran penduduk yang berusia 0-17 tahun)	3 bulan
		71	Kepemilikan KTP Elektronik	3 bulan
		72	Penduduk yang memiliki NIK	3 bulan
		73	Penerbitan akta perkawinan	3 bulan
		74	Perkembangan jumlah penduduk	3 bulan
		75	Perkembangan jumlah penduduk menurut umur dan gender laki - laki	3 bulan
		76	Perkembangan jumlah penduduk menurut umur dan gender Perempuan	3 bulan
		77	Rasio ketergantungan penduduk	3 bulan
		78	Rasio ketergantungan total	3 bulan
12	DINAS KESEHATAN	79	Anggaran Kesehatan terhadap APBD Kabupaten	3 bulan
		80	Angka Keberlangsungan Hidup Bayi	3 bulan
		81	Angka Kejadian Malaria	3 bulan
		82	Angka Kematian Bayi	3 bulan
		83	Angka Kematian Ibu	3 bulan
		84	Angka Kesakitan Penderita DBD	3 bulan
		85	Angka Kesehatan ODGJ	3 bulan
		86	Angka Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	3 bulan
		87	Angka Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Kusta	3 bulan
		88	Angka Kesehatan Orang dengan TB	3 bulan
		89	Angka Kesehatan Penderita DM	3 bulan
		90	Angka Kesehatan Penderita Hipertensi	3 bulan
		91	Angka Kesembuhan Penderita Tuberkulosis	3 bulan
		92	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	3 bulan
		93	Cakupan Desa Siaga Aktif	3 bulan
		94	Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	3 bulan
		95	Cakupan Jaminan Kesehatan	3 bulan
		96	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	3 bulan
		97	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA+	3 bulan
		98	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	3 bulan
		99	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 bulan
		100	Kejadian Luar Biasa	3 bulan
		101	Kunjungan Neonatal	3 bulan
		102	Pelayanan Kesehatan Balita	3 bulan

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA	SIKLUS PEMBARUAN DATA
1	2	3	4	5
		103	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3 bulan
		104	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3 bulan
		105	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3 bulan
		106	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	3 bulan
		107	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	3 bulan
		108	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	3 bulan
		109	Penderita Diare Yang Ditangani	3 bulan
		110	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	3 bulan
		111	Posyandu Aktif	3 bulan
		112	Presentase Desa ODF	3 bulan
		113	Prevalensi Gizi Buruk	3 bulan
		114	Prevalensi Gizi Kurang	3 bulan
		115	Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk	3 bulan
		116	Rasio Posyandu	3 bulan
		117	Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	3 bulan
		118	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	3 bulan
		119	Rasio Tenaga Medis per penduduk	3 bulan
		120	Sarana Pelayanan Kesehatan Lain	3 bulan
		121	Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian	3 bulan
		122	Stunting	3 bulan
		123	Tingkat Kematian Akibat Malaria	3 bulan
		124	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	3 bulan
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	125	Angka Kecukupan gizi (Angka Kecukupan Energy)	3 bulan
		126	Angka Kecukupan gizi (Angka Kecukupan Protein)	3 bulan
		127	Angka konsumsi energi dan protein	3 bulan
		128	Desa berdasarkan kerentanan pangan	3 bulan
		129	Distribusi dan akses pangan	3 bulan
		130	Jumlah produksi garam	3 bulan
		131	Jumlah produksi perikanan	3 bulan
		132	Jumlah produktivitas garam	3 bulan
		133	Jumlah produktivitas ikan	3 bulan
		134	Kebutuhan ketahanan pangan dalam mengatasi covid 19	3 bulan
		135	Ketersediaan energi dan protein	3 bulan
		136	Konsumsi ikan	3 bulan
		137	penanganan kerawanan pangan	3 bulan

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA	SIKLUS PEMBARUAN DATA
1	2	3	4	5
		138	Penganekaraman dan keamanan pangan daerah	3 bulan
		139	Rasio pangan daerah	3 bulan
		140	Rata-rata cadangan pangan masyarakat	3 bulan
		141	Skor pola pangan harapan	3 bulan
14	DISKOMINFO	142	Data informasi sektoral	3 bulan
		143	Indeks SPBE	3 bulan
		144	Jumlah jaringan komunikasi	3 bulan
		145	Jumlah jaringan telepon genggam	3 bulan
		146	Jumlah jaringan telepon stasioner	3 bulan
		147	Jumlah penyiaran radio/tv lokal	3 bulan
		148	Jumlah surat kabar Nasional/Lokal	3 bulan
		149	Persentase penduduk yang menggunakan HP	3 bulan
		150	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3 bulan
		151	Total jaringan komunikasi	3 bulan
15	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	152	Website milik pemerintah daerah	3 bulan
		153	Jumlah Koperasi Aktif	3 bulan
		154	Jumlah Koperasi Sehat	3 bulan
		155	Jumlah usaha mikro	3 bulan
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	156	Persentase jumlah koperasi sehat dan aktif	3 bulan
		157	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	3 bulan
		158	Jumlah Pemantauan Status Mutu Air	3 bulan
		159	Jumlah perusahaan wajib AMDAL	3 bulan
		160	Jumlah sampah yang diolah	3 bulan
		161	Kasus Lingkungan	3 bulan
17	DINAS PUPR	162	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3 bulan
		163	Bangunan Irigasi Sekunder	3 bulan
		164	Indeks Pembangunan Infrastruktur	3 bulan
		165	Jumlah Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	3 bulan
		166	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang	3 bulan
		167	Ketaatan terhadap Rencana tata ruang wilayah (rtrw)	3 bulan
		168	Kondisi Jaringan irigasi primer, sekunder (Jaringan & Bangunan Irigasi Sekunder)	3 bulan
		169	Luas Wilayah Produktif	3 bulan
		170	Panjang Jaringan Jalan Desa berdasarkan Kodisi	3 bulan
		171	Panjang Jaringan Jalan Kabupaten berdasarkan kondisi	3 bulan
		172	Penggunaan lahan berdasarkan RTRW	3 bulan
		173	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	3 bulan

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA	SIKLUS PEMBARUAN DATA
1	2	3	4	5
		174	Rasio	3 bulan
		175	Rasio Jaringan Irigasi	3 bulan
		176	Rasio luas Areal layanan irigasi kondisi baik	3 bulan
		177	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	3 bulan
		178	Rasio rekomendasi teknis IMB	3 bulan
		179	Sekunder	3 bulan
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	180	Badan Usaha Milik Desa	3 bulan
		181	PKK aktif	3 bulan
		182	Status Desa	3 bulan
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	183	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	3 bulan
		184	Jumlah izin yang dikeluarkan	3 bulan
		185	Jumlah pengaduan	3 bulan
		186	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	3 bulan
		187	Lama Proses Perizinan	3 bulan
		188	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	3 bulan
20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	189	Angka Kelulusan Sekolah	3 bulan
		190	Angka Melanjutkan Sekolah	3 bulan
		191	Angka Pendidikan yang ditamatkan	3 bulan
		192	Angka Putus Sekolah	3 bulan
		193	APK Paud, SD, SMP, Kecamatan	3 bulan
		194	APM SD/MI, SMP/MTs, Kecamatan	3 bulan
		195	APS SD/MI, SMP/MTs, Kecamatan	3 bulan
		196	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	3 bulan
		197	Indeks Pendidikan	3 bulan
		198	Jumlah gedung kesenian	3 bulan
		199	Jumlah Gedung SD Per Kecamatan	3 bulan
		200	Jumlah Gedung SMP Per Kecamatan	3 bulan
		201	Jumlah grup kesenian	3 bulan
		202	Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	3 bulan
		203	Perkembangan kondisi Bangunan	3 bulan
		204	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	3 bulan
		205	Rasio Guru Murid	3 bulan
		206	Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SD,SMP,Kecamatan	3 bulan
		207	Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya	3 bulan

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA	SIKLUS PEMBARUAN DATA
1	2	3	4	5
21	DINAS PPKB dan PPPA	208	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15â€“19) per 1.000 perempuan usia 15â€“19 tahun (ASFR 15â€“19)	3 bulan
		209	Angka kelahiran Total	3 bulan
		210	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	3 bulan
		211	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	3 bulan
		212	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	3 bulan
		213	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	3 bulan
		214	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	3 bulan
		215	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	3 bulan
		216	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	3 bulan
		217	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	3 bulan
		218	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	3 bulan
		219	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	3 bulan
		220	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	3 bulan
		221	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	3 bulan
		222	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	3 bulan
		223	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	3 bulan
		224	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	3 bulan
		225	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	3 bulan
		226	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	3 bulan
		227	Indeks Pembangunan Gender	3 bulan
		228	Jumlah Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	3 bulan

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA	SIKLUS PEMBARUAN DATA
1	2	3	4	5
		229	Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga	3 bulan
		230	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	3 bulan
		231	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	3 bulan
		232	Kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak	3 bulan
		233	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	3 bulan
		234	Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD Kabupaten Jombang	3 bulan
		235	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3 bulan
		236	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	3 bulan
		237	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	3 bulan
		238	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	3 bulan
		239	Persentase korban yang mendapatkan layanan secara tuntas	3 bulan
		240	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	3 bulan
		241	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	3 bulan
		242	Rasio akseptor KB	3 bulan
		243	Rasio KDRT	3 bulan
		244	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	3 bulan
		245	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3 bulan
		246	Rata-rata usia kawin pertama wanita	3 bulan
		247	Ratio Akseptor KB	3 bulan
		248	Standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak	3 bulan
		249	Total Fertility Rate (TFR)	3 bulan
22	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	250	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	3 bulan
		251	Cakupan bina kelompok pengrajin	3 bulan
		252	Jumlah pasar daerah	3 bulan
		253	Jumlah pedagang yang dapat ditampung di pasar	3 bulan
		254	Kinerja nilai ekspor bersih	3 bulan
		255	Kontribusi Kategori Industri Pengolahan	3 bulan
		256	Volume usaha industri kecil dan menengah	3 bulan

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA	SIKLUS PEMBARUAN DATA
1	2	3	4	5
23	DINAS PERHUBUNGAN	257	Angkutan darat dan penumpang	3 bulan
		258	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	3 bulan
		259	Izin trayek perdesaan	3 bulan
		260	Jangka waktu proses KIR	3 bulan
		261	Jaringan trayek terlayani	3 bulan
		262	Jumlah kendaraan wajib uji	3 bulan
		263	Jumlah kendaraan yang mati uji KIR	3 bulan
		264	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	3 bulan
		265	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	3 bulan
		266	Jumlah pemasangan rambu-rambu	3 bulan
		267	Jumlah terminal	3 bulan
		268	Jumlah uji kir angkutan umum	3 bulan
		269	Kualitas layanan transportasi	3 bulan
		270	Pemasangan Rambu-rambu	3 bulan
		271	Perlengkapan jalan	3 bulan
		272	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	3 bulan
		273	Rasio ijin trayek	3 bulan
		274	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	3 bulan
		275	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	3 bulan
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	276	Hasil Pengawasan Kearsipan / Kualitas Pengelolaan Arsip	3 bulan
		277	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	3 bulan
		278	Jumlah perpustakaan yang dibina	3 bulan
		279	Jumlah unit kearsipan yang telah menerapkan pengelolaan kearsipan	3 bulan
		280	Koleksi buku di perpustakaan umum	3 bulan
		281	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	3 bulan
25	DINAS PERTANIAN	282	Indeks Keberlanjutan Usaha Tani	3 bulan
		283	Kelembagaan sektor pertanian	3 bulan
		284	Kontribusi Kategori pertanian, kehutanan & perikanan	3 bulan
		285	Nilai Tukar Petani	3 bulan
		286	Produksi komoditas perkebunan	3 bulan
		287	Produksi tanaman hortikultura	3 bulan
		288	Produksi tanaman pangan utama	3 bulan
		289	Produktivitas komoditas perkebunan	3 bulan
		290	Produktivitas tanaman hortikultura	3 bulan
		291	Produktivitas tanaman pangan utama	3 bulan
26	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	292	Indeks Infrastruktur Permukiman	3 bulan

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA	SIKLUS PEMBARUAN DATA
1	2	3	4	5
		293	Indeks Kualitas Permukiman dan Kawasan Permukiman	3 bulan
		294	Penanganan RTLH yang direhab	3 bulan
		295	Penyedia dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	3 bulan
		296	Persentase rumah bersanitasi	3 bulan
		297	Rasio rumah tangga pengguna air bersih	3 bulan
		298	Rasio TPU per penduduk	3 bulan
27	DINAS PETERNAKAN	299	Konsumsi daging, telur, susu	3 bulan
		300	Populasi ternak	3 bulan
		301	Produksi daging, telur, susu	3 bulan
28	DINAS SATPOL PP	302	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 bulan
		303	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 bulan
		304	Jumlah Tenaga Linmas	3 bulan
		305	Rasio jumlah satpol PP per 10.000 penduduk	3 bulan
29	DINAS SOSIAL	306	Jumlah PMKS	3 bulan
		307	Jumlah sarana sosial	3 bulan
		308	Sosial Permendagri	3 bulan
		309		3 bulan
30	DINAS TENAGA KERJA	310	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per tahun	3 bulan
		311	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	3 bulan
		312	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek	3 bulan
		313	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	3 bulan
		314	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	3 bulan
		315	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	3 bulan
		316	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	3 bulan
		317	Jumlah Transmigrasi	3 bulan
		318	Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	3 bulan
31	Inspektorat	319	Capaian Kapabilitas APIP	3 bulan
		320	Capaian Maturitas SPIP	3 bulan
32	SEKRETARIAT DPRD	321	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Dewan	3 bulan
		322	Rasio ketergantungan total	3 bulan
		323	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	3 bulan

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA	SIKLUS PEMBARUAN DATA
1	2	3	4	5
		324	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	3 bulan
		325	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	3 bulan

- Persentase data yang dapat berbagi pakai

$$\frac{325 \text{ data yang dapat berbagi pakai}}{325 \text{ data yang dimiliki PD}} \times 100\% = 100\%$$

- Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city

$$\frac{22 \text{ PD yang mengimplementasi inovasi}}{53 \text{ PD}} \times 100\% = 50,82\%$$

REKAPITULASI DATA INOVASI PENDUKUNG *SMART CITY* PADA PD

TAHUN 2022

NO	OPD	NAMA SISTEM ELEKTRONIK		KETERANGAN
1	BAPPEDA	1	SIPD	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
2	BPKAD	2	E-SULASH	Sistem Informasi Usulan Standar Harga
3	BPKAD	3	SIPD Keuangan/Penatausahaan	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
4	BAG. PBJ	4	SPSE	Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		5	SIBAJA	Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
5	BKDPP	6	SIAP-ASN	Sistem Informasi Penataan ASN
6	BAG. ORGANISASI	7	E-SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		8	E-OFFICE	Sistem Aktivitas Kepegawaian (TPP)
7	INSPEKTORAT	9	E-AUDIT	sistem pengawasan internal pemerintah Kabupaten
8	BAG. PEMBANGUNAN	10	JOS	Jombang One System (aplikasi integrasi perencanaan, sistem penganggaran, manajemen akuntabilitas kinerja dan keuangan)
9	DISKOMINFO	11	SATUDATA	Pusat Data Kabupaten Jombang
10	BAG. HUKUM	12	JDIH	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
11	DPMPSTP	13	SIRINDUNONA	Sistem aplikasi pelayanan perizinan non berusaha
12	BAPENDA	14	SIMPADDU	Sistem Informasi Pajak Daerah Online

NO	OPD	NAMA SISTEM ELEKTRONIK		KETERANGAN
13	DPMD	15	SABDOPALON	Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Desa
14	DISPENDUKCAPIL	16	DUKCAPIL/YAONAH	Layanan Online Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15	DLH	17	SILAJANG	Sistem Informasi Laboratorium Jombang
16	PERTANIAN	18	ADAPTIF	Sistem Informasi Tanam dan Panen di Kabupaten Jombang
		19	SIMFONI	Sistem Informasi GAPOKTAN
17	PUPR	20	SIMENARA	Sistem Informasi Menara Telekomunikasi Berbasis Geografis (Peta)
18	DINKES	21	SIDAVID	Sistem Informasi Data Covid
19	BAG. TATA PEMERINTAHAN	22	LAKSAMANA	Aplikasi Layanan Kerjasama Jombang
20	DINSOS	23	INTUISI	Sistem Informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan (SIKS-NG)
21	DISPERPUSIP	24	INLIS LITE	Integrated Library System (Layanan Anggota Perpustakaan)
		25	SRIKANDI	Layanan Persuratan dan Kearsipan
22	DISKOPUM	26	BLONJO	Aplikasi Belanja Produk UMKM

- Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas

$$\text{Kominfo4/9} \times 100\% =$$

44,45%

DATA ASN TENAGA PENGELOLA TIK TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG

NO	NAMA	NIP	KETERANGAN
1	R. WITCAKSONO SETYO P, S.Si, M.Eng	19800914 2005011007	Sertifikasi
2	ELOK SRI WAHYUNI, S.Kom., M.T	19761124 2005012009	Sertifikasi
3	NURIYAH JAUHAR KAMILAH BASA, S.Kom	19830520 2011012004	Belum Sertifikasi
4	M. JAZULI, S.T	197200118 2001121001	Belum Sertifikasi
5	FIRLANA NURDIANSYAH, S.Kom	19830225 2011011004	Sertifikasi
6	ANUGERAH ANANG, AMd	19830521 2006041008	Serifikasi
7	ALIVIA RAHMAWATI	19980723 202012 2003	Belum Sertifikasi
8	NABILA ARDHANA, A.Md.Kom	19970628 202012 2 004	Belum Sertifikasi
9	MOCHAMAD NUR HASAN, A.Md	199902072022031002	Belum Sertifikasi

- Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government.

NO	DOKUMEN IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT
1	2
1	ARSITEKTUR SPBE
2	MASTERPLAN SMARTCITY
3	PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
4	SK TIM KOORDINASI DAN TIM ASSESOR INTERNAL PENYELENGGARAAN SPBE KABUPATEN JOMBANG
5	SK TIM FORUM DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN JOMBANG
6	KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR : 188.4.45/355/415.10.1.3/2019 TENTANG TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KABUPATEN JOMBANG
7	KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 188.4.45/179/415.10.1.3/2022 TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN JOMBANG
8	KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR : 188.4.45/174/415.10.1.3/2022 TENTANG TIM PELAKSANA GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

NO	DOKUMEN IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT
9	KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 188/188/415.23/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dari dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota

IKK Outcome/Hasil

(42.140) Jumlah masyarakat yang menjadi penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten Kota

$$\frac{\text{(970.427) Jumlah Penduduk}}{\text{(42.140)}} \times 100\% = 4.34$$

**DATA PELAKSANAAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022
TERKAIT KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG**

No	URAIAN	LOKASI	JUMLAH PESERTA
1	Jumpa fans HUT Radio SJFM	Radio SJFM	125 peserta
2	Kominfo "Goes to School" Public Speaking	MAN 6 Murukan Mojoagung	75 peserta
3	Pembinaan Dan Pelatihan KIM Tema : Pelatihan dan pemanfaatan Media Komunikasi dan Informasi desa melalui Website dan Podcast	Ds.Kwaron Kec.Diwek	55 peserta
4	Rapat koordinasi PPID	Pemkap Jombang R.Suro	60 peserta
5	Dialog Interaktif Warungpojok Kebonrojo Regional Tema : Serap aspirasi masyarakat pada sektor Pelayanan Publik maupun program Pemerintah Daerah di bidang Pertanian,peternakan,perikanan serta intrastuktur di wilayah Kec Peterongan	Ds.Tengaran Kec Peterongan	500 peserta
6	Sosialisasi Lapor SP4N Goes To Pesantren	Ds.Kwaron ,Kec Diwek	70 peserta
7	Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Kepemerintahan Desa	Kantor Kecamatan Ngoro dan Kantor Kecamatan Peterongan	156 peserta
8	Ngopi bareng Medsos Tema : Kopilaborasi pegiat medsos dalam rangka menunjang Publikasi Pemerintah Daerah dan Potensi Kab.Jombang	Pendopo Kabupaten Jombang	100 peserta
9	Dialog Interaktif Warungpojok Kebonrojo Regional, Tema : Penguatan UMKM melalui e-katalog lokal sebagai upaya akselerasi pemulihan ekonomi di Kab.Jombang	Pusdiklat Pramuka ,Kec.Ngoro	500 peserta
10	Dialog Interaktif Warungpojok Kebonrojo Regional, Tema : Penguatan UMKM melalui e-katalog lokal sebagai upaya akselerasi pemulihan ekonomi di Kab.Jombang	Lapangan SD Losari Kec.Ploso	500 peserta
11	Dialog Interaktif Warungpojok Kebonrojo Regional, Tema : Strategi Dorong Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Desa.	Kecamatan Diwek	500 peserta

12	Dialog Interaktif Warungpojok Kebonrojo Regional, Tema : Strategi Penanganan Bencana melalui Mitigasi Resiko”	Kecamatan Sumobito	500	peserta
13	Dialog Interaktif Warungpojok Kebonrojo Lokal, Tema : Kewaspadaan Gagal Ginjal Akut pada Anak di Kabupaten Jombang.	Warung Lasiyem Jl.Halmahera (Timur SDN Kaliwungu 2 Jombang)	100	peserta
14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai	Ds. Gedangan, Kec. Mojowarno Ds. Mojoware, Kec. Mojowarno Ds. Gedangan, Kec. Mojowarno Ds. Mojokrapak, Kec. Tembelang Ds. Kalikejamber, Kec. Tembelang Ds. Kedunglosari, Kec. Tembelang	450	peserta
15	Instagram @jombangkab	Instagram	17,000	pengikut
16	Pengikut di Facebook Kabupaten Jombang	Facebook	4,999	pengikut
17	Pengikut di Youtube Jombangkab TV	Youtube	8,800	pengikut
18	Jangkauan Siaran Radio SJFM di 21 Kecamatan Jadwal Talkshow Interaktif Radio - Senin 09.00 -10.00 Mitra Tani 12.00 - 13.00 Kiat Mandiri - Selasa 09.00 - 10.00 Pojok Literasi 10.00 - 11.00 Plesir - Rabu 09.00 - 10.00 Pojok Literasi 12.00 - 13.00 Sehat Bersama RSUD - Kamis 09.00 - 10.00 Halo Anak 12.00 - 13.00 Pojok Tamu - Jumat 09.00 - 10.00 Pojok Demokrasi	Frekuensi 104.1 FM, live, talkshow dan streaming radio online	7,650	orang
Total			42,140	

- Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota

**REKAPITULASI KOMUNITAS MASYARAKAT/ MITRA STRATEGIS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2022**

NO	NAMA KOMUNITAS	STATUS	KETERANGAN
1	PWI Kabupaten Jombang	AKTIF	Persatuan Wartawan Indonesia
2	Jombang Travel	AKTIF	Komunitas Pegiat Pariwisata di Kab. Jombang
3	UKM Jombang	AKTIF	Komunitas UMKM di Kab. Jombang
4	KIM Desa Menturus, Kudu	AKTIF	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Menturus Kecamatan Kudu
5	KIM Desa Japanan, Mojowarno	AKTIF	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Japanan Kecamatan Mojowarno
6	KIM Desa Kwaron, Diwek	AKTIF	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Kwaron Kecamatan Diwek
7	Info Jombang	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
8	Event Jombang	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
9	Warga Jombang	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
10	Info Loker Jombang	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
11	Info Seputar Jombang	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
12	Jombang Loker	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
13	Jombang Mbois	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
14	Kuliner Jombang	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
15	Jombang Awesome	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
16	Jombang Suka Suka	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
17	Jombang Informasi	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
18	Jombang Maneh	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
19	Siswa Jombang	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
20	Jombang Paradise	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
21	Jombang Hits	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
22	Pesona Jombang	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
23	Info Wilayah Jombang	AKTIF	Medsos facebook di Kabupaten Jombang
24	Informasi Jombang Beriman	AKTIF	Medsos facebook di Kabupaten Jombang
25	Info Jombang Cepat	AKTIF	Medsos facebook di Kabupaten Jombang
26	Info Seputar Mojoagung	AKTIF	Medsos facebook di Kabupaten Jombang
27	Explore Wonosalam	AKTIF	Medsos facebook di Kabupaten Jombang
28	Info Lantas Kriminal Jombang	AKTIF	Medsos facebook di Kabupaten Jombang
29	Kiki Anjani	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
30	Wonderful Wonosalam	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
31	Wongg Jombang TV	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
32	Wisata Jombang	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
33	Njombangan	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
34	Jombang Bangkit	AKTIF	Medsos Instagram di Kabupaten Jombang
JUMLAH		34	34

- Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)

$$\frac{376 \text{ jumlah program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{376 \text{ jumlah program dan kebijakan STRAKOM yang dipublikasikan}} \times 100\%$$

Program dan kebijakan pemerintah dipublikasikan melalui portal resmi Jombangkab

REKAPITULASI KONTEN INFORMASI PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

NO	BULAN	JUMLAH	MEDIA PUBLIKASI
1	Januari	0	Website https://jombangkab.go.id/
2	Februari	19	Website https://jombangkab.go.id/
3	Maret	32	Website https://jombangkab.go.id/
4	April	24	Website https://jombangkab.go.id/
5	Mei	24	Website https://jombangkab.go.id/
6	Juni	25	Website https://jombangkab.go.id/
7	Juli	37	Website https://jombangkab.go.id/
8	Agustus	50	Website https://jombangkab.go.id/
9	September	25	Website https://jombangkab.go.id/

NO	BULAN	JUMLAH	MEDIA PUBLIKASI
10	Oktober	52	Website https://jombangkab.go.id/
11	November	39	Website https://jombangkab.go.id/
12	Desember	49	Website https://jombangkab.go.id/
JUMLAH		376	

- Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan

$$\frac{64 \text{ Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan}}{64 \text{ Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dipublikasikan}} \times 100\%$$

Program dan kebijakan pemerintah dipublikasikan melalui website JDIH dan portal resmi Jombangkab.

REKAPITULASI KEGIATAN DISEMINASI DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH	MEDIA PUBLIKASI
1	Publikasi Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah	5	Website https://jdih.jombangkab.go.id/
2	Permintaan Informasi melalui PPID	59	Website https://ppid.jombangkab.go.id/
JUMLAH		64	

PERSANDIAN

Output

Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

$$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$$

$$\frac{283}{645} \times 100\% = 43.8760\%$$

Hasil evaluasi telah dijabarkan dalam Buku **Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi di Kabupaten Jombang Tahun 2022** yang telah diserahkan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy, adapun hasil evaluasi akhir seperti yang tercantum dalam Buku Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi di Kabupaten Jombang Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.14 Persentase Pencapaian dan Tingkat Kematangan tiap Area Penilaian

Area Penilaian	Skor Responden	Skor Maksimal	Persentase Pencapaian	Tingkat Kematangan
Tata Kelola	90	126	71,4%	II
Pengelolaan Risiko	22	72	30,5%	I+
Kerangka Kerja	43	159	27%	I+
Pengelolaan Aset	77	168	45,8%	II
Teknologi dan Keamanan Informasi	51	120	42,5%	I+

Namun hasil assesment tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan hasil assesment Indeks KAMI 2021, tingkat kelengkapan pemenuhan standar SNI ISO/IEC : 27001 Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Jombang telah mengalami peningkatan dari tingkatan tidak layak menjadi tingkat pemenuhan kerangka kerja dasar.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat keamanan informasi infrastruktur teknologi informasi dan ruang server pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Jombang masuk dalam tingkat kematangan “Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar” dengan skor perolehan 283 dari total skor 645 dengan hasil 43.8760%

Outcome :

- Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan.

KEGIATAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
YANG DILAKUKAN PENGAMANAN SINYAL
TAHUN 2022

NO	BULAN	JUMLAH KEGIATAN STRATEGIS	KETERANGAN
1	JANUARI	5	Telah Dilakukan pengamanan Sinyal (Jadwal Kegiatan Strategis Terlampir)
2	FEBRUARI	9	Telah Dilakukan pengamanan Sinyal (Jadwal Kegiatan Strategis Terlampir)
3	MARET	8	Telah Dilakukan pengamanan Sinyal (Jadwal Kegiatan Strategis Terlampir)
4	APRIL	5	Telah Dilakukan pengamanan Sinyal (Jadwal Kegiatan Strategis Terlampir)
5	MEI	7	Telah Dilakukan pengamanan Sinyal (Jadwal Kegiatan Strategis Terlampir)
6	JUNI	7	Telah Dilakukan pengamanan Sinyal (Jadwal Kegiatan Strategis Terlampir)
7	JULI	3	Telah Dilakukan pengamanan Sinyal (Jadwal Kegiatan Strategis Terlampir)
8	AGUSTUS	7	Telah Dilakukan pengamanan Sinyal (Jadwal Kegiatan Strategis Terlampir)
9	SEPTEMBER	8	Telah Dilakukan pengamanan Sinyal (Jadwal Kegiatan Strategis Terlampir)
10	OKTOBER	4	Telah Dilakukan pengamanan Sinyal (Jadwal Kegiatan Strategis Terlampir)
11	NOPEMBER	4	Telah Dilakukan pengamanan Sinyal (Jadwal Kegiatan Strategis Terlampir)
12	DESEMBER	6	Telah Dilakukan pengamanan Sinyal (Jadwal Kegiatan Strategis Terlampir)
TOTAL		73	

- Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah.

DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK YANG MENERAPKAN PRINSIP MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (SMKI) DAN DIAMANKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DI KABUPATEN JOMBANG

TAHUN 2022

NAMA SISTEM ELEKTRONIK		LINK	KETERANGAN	DIAMANKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN APLIKASI PENYANDIAN (YA/TIDAK)
1	SIPD	https://jombangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	YA
2	E-SULASH	https://e-sulash.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Usulan Standar Harga	YA
3	SIPD Keuangan/Penatausahaan	https://jombangkab.sipd.kemendagri.go.id/siap/login	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	YA
4	SPSE	https://lpse.jombangkab.go.id/eproc4/	Sistem Pengadaan Secara Elektronik	YA
5	SIBAJA	http://sibaja.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	YA
6	SIAP-ASN	https://siapasn.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Penataan ASN	YA
7	E-SAKIP	http://e-sakip.jombangkab.go.id/	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	YA
8	E-OFFICE	https://e-office.jombangkab.go.id/	Sistem Aktivitas Kepegawaian (TPP)	YA
9	E-AUDIT	https://inspektorat.jombangkab.go.id/	sistem pengawasan internal pemerintah Kabupaten	YA
10	JOS	https://jos.jombangkab.go.id/	Jombang One System (aplikasi integrasi perencanaan, sistem penganggaran, manajemen akuntabilitas kinerja dan keuangan)	YA
11	SATUDATA	https://satudata.jombangkab.go.id	Pusat Data Kabupaten Jombang	YA
12	JDIH	https://jdih.jombangkab.go.id	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	YA
13	SIRINDUNONA	https://perizinan.jombangkab.go.id/	Sistem aplikasi pelayanan perizinan non berusaha	YA

14	SIMPADDU	https://bapenda.jombangkab.go.id/simpadu/ex1s/index.php	Sistem Informasi Pajak Daerah Online	YA
15	SABDOPALON	https://sabdopalon.jombangkab.go.id/	Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Desa	YA
16	DUKCAPIL/YAONAH	https://dukcapil.jombangkab.go.id/	Layanan Online Kependudukan dan Pencatatan Sipil	YA
17	SILAJANG	https://silajang.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Laboratorium Jombang	YA
18	ADAPTIF	https://adaptif.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Tanam dan Panen di Kabupaten Jombang	YA
19	SIMFONI	https://simfoni.jombangkab.go.id	Sistem Informasi GAPOKTAN	YA
20	SIMENARA	https://simenara.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Menara Telekomunikasi Berbasis Geografis (Peta)	YA
21	SIDAVID	https://datacovid.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Data Covid	YA
22	LAKSAMANA	https://laksamana.jombangkab.go.id/Beranda	Aplikasi Layanan Kerjasama Jombang	YA
23	INTUISI	https://intuisi.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan (SIKS-NG)	YA
24	INLIS LITE	https://perpus.jombangkab.go.id	Integrated Library System (Layanan Anggota Perpustakaan)	YA
25	SRIKANDI	https://srikandi.arsip.go.id/	Layanan Persuratan dan Kearsipan	YA
26	BLONJO	https://blonjo.jombangkab.go.id/	Aplikasi Belanja Produk UMKM	YA

- Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah

$$\begin{array}{l}
 \text{Jumlah nilai per area keamanan informasi} \\
 \text{-----} \\
 \text{Jumlah area penilaian}
 \end{array}
 \times 100\%$$

$$\frac{21}{58} \times 100\% = 36,21\%$$

- Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan.

$$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{26} \times 100\% = 0\%$$

**DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK YANG DIAUDIT DENGAN RESIKO KATEGORI TINGGI
DI KABUPATEN JOMBANG**

TAHUN 2022

NAMA SISTEM ELEKTRONIK		LINK	KETERANGAN	KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK (RENDAH/TINGGI)
1	SIPD	https://jombangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	TINGGI
2	E-SULASH	https://e-sulash.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Usulan Standar Harga	TINGGI
3	SIPD Keuangan/Penatausahaan	https://jombangkab.sipd.kemendagri.go.id/siap	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	TINGGI
4	SPSE	https://lpse.jombangkab.go.id/eproc4/	Sistem Pengadaan Secara Elektronik	TINGGI
5	SIBAJA	http://sibaja.jombangkab.go.id/login	Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	TINGGI
6	SIAP-ASN	https://siapasn.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Penataan ASN	TINGGI
7	E-SAKIP	http://e-sakip.jombangkab.go.id/	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	TINGGI
8	E-OFFICE	https://e-office.jombangkab.go.id/	Sistem Aktivitas Kepegawaian (TPP)	TINGGI
9	E-AUDIT	https://inspektorat.jombangkab.go.id/	sistem pengawasan internal pemerintah Kabupaten	TINGGI
10	JOS	https://jos.jombangkab.go.id/	Jombang One System (aplikasi integrasi perencanaan, sistem penganggaran, manajemen akuntabilitas kinerja dan keuangan)	TINGGI
11	SATUDATA	https://satudata.jombangkab.go.id/	Pusat Data Kabupaten Jombang	TINGGI
12	JDIH	https://jdih.jombangkab.go.id/	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	TINGGI
13	SIRINDUNONA	https://perizinan.jombangkab.go.id/	Sistem aplikasi pelayanan perizinan non berusaha	TINGGI
14	SIMPADDU	https://bapenda.jombangkab.go.id/simpadu/ex1s/index.php	Sistem Informasi Pajak Daerah Online	TINGGI
15	SABDOPALON	https://sabdopalon.jombangkab.go.id/	Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Desa	TINGGI

16	DUKCAPIL/YAONAH	https://dukcapil.jombangkab.go.id/yaonah	Layanan Online Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TINGGI
17	SILAJANG	https://silajang.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Laboratorium Jombang	TINGGI
18	ADAPTIF	https://adaptif.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Tanam dan Panen di Kabupaten Jombang	TINGGI
19	SIMFONI	https://simfoni.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi GAPOKTAN	TINGGI
20	SIMENARA	https://simenara.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Menara Telekomunikasi Berbasis Geografis (Peta)	TINGGI
21	SIDAVID	https://sidavid.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Data Covid	TINGGI
22	LAKSAMANA	https://laksamana.jombangkab.go.id/	Aplikasi Layanan Kerjasama Jombang	TINGGI
23	INTUISI	https://intuisi.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan (SIKS-NG)	TINGGI
24	INLIS LITE	https://inlis.jombangkab.go.id/lite	Integrated Library System (Layanan Anggota Perpustakaan)	TINGGI
25	SRIKANDI	https://srikandi.jombangkab.go.id/	Layanan Persuratan dan Kearsipan	TINGGI
26	BLONJO	https://blonjo.jombangkab.go.id/	Aplikasi Belanja Produk UMKM	TINGGI

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SMP/standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Realisasi Renstra PD			Target Renstra		Ket
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	-	-	N/A	N/A	100%	100%	100%	
2	Indeks Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik (I-PIKP)	-	-	N/A	N/A	81,6	62	63	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	-	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	N/A	N/A	85,81	84	84,5	
4	Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	N/A	N/A	Level 2	Level 2	Level 2	
5	Indeks SPBE terkait Layanan Komunikasi dan Informatika	-	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	N/A	N/A	18 indikator terkelola	8 indikator terkelola	8 indikator terkelola	

--	--

No	Indikator	SMP/standar Nasional	IKK	Realisasi Renstra PD			Target Renstra		Ket
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	-	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	N/A	N/A	100%	100%	100%	
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	N/A	N/A	100%	100%	100%	
7	Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	-	-	N/A	N/A	3.164	3,52	3,53	
8	Persentase Sistem elektronik yang berfungsi dengan baik	-	Tingkat Keamanan Informasi pemerintah	N/A	N/A	50%	75%	100%	

--	--

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil revidi pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang telah berlangsung cukup baik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai mediator masyarakat dengan aparatur dalam penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam penyelenggara penyampaian informasi di pemerintah daerah di berbagai wilayah dituntut untuk lebih produktif, rasional dan mengikuti perkembangan yang ada serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka masih terdapat beberapa permasalahan yang krusial dalam rangka pengembangan penyampaian informasi, diantaranya :

Form Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis

Identifikasi Permasalahan	Akar Masalah	Data/Informasi Terkait	Isu Strategis
1	2	3	4
Terbatasnya Informasi Publik yang diterima masyarakat	Keterbatasan Akses Informasi yang diterima oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang baik dan berkualitas Masih kurangnya kesadaran OPD untuk memberikan informasi pada publik Pembinaan Komunikasi Informasi Masyarakat (KIM) yang belum optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemerintahan yang belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga menimbulkan isu tuntutan penciptaan pemerintahan yang dipercaya masyarakat.
Masih Rendahnya Pemanfaatan Aplikasi OPD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Sistem Aplikasi yang dibangun OPD sulit untuk diintegrasikan Belum optimalnya pembangunan / penyediaan jaringan internet dalam rangka meningkatkan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik Pada saat pembuatan aplikasi tidak berkoordinasi dengan Dinas Kominfo	Indeks SPBE	Perlunya mengoptimalkan Sistem pemerintahan yang integratif
Masih rendahnya Indeks SPBE	Komitmen OPD di Lingkungan Pemkab masih		

	kurang khususnya dalam Pelaksanaan SPBE		
	Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal		
Masih rendahnya Indeks Keamanan Informasi	Kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi		
	Terbatasnya Tenaga Teknis Untuk Pengamanan Informasi		
	Antrian penanganan sertifikat elektronik di BSSN	Indeks KAMI BSSN	
Kesulitan pengumpulan data sektoral yang ada pada OPD	OPD menunda/ tidak mengirim data sektoral yang diminta		
Inkonsistensi data	Metodologi yang digunakan dan jangka waktu yang dipakai		
	Keterbatasan SDM yang baik dari segi jumlah maupun pengetahuan	Portal Satu Data Kabupaten Jombang	
Belum ada standarisasi data dan kualitas analisis data yang belum terjamin	terdapat kesenjangan data antara yang dibutuhkan dengan data yang tersedia		
	perubahan alur pengumpulan data sektoral		

Usaha penanggulangan masalah yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah:

- Pengembangan aplikasi teknologi dan informasi guna peningkatan kualitas layanan publik baik dari sisi kemudahan, efisiensi waktu, biaya, dan administrasi. Memberikan informasi kepada masyarakat melalui *e-government* tanpa harus datang ke kantor dengan memberikan layanan media komunikasi elektronik selain di website juga melalui android dan IOS.
- Penyediaan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Meningkatkan kualitas SDM yang menangani infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Pelatihan untuk pegawai dalam bidang keilmuan komunikasi dan Informatika

- Mengupayakan peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi dalam memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, baik antar sektor di lingkungan pemerintahan, pemerintah dengan stakeholders maupun pemerintah dengan masyarakat.

Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2023 Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Penggunaan sistem aplikasi dalam menerapkan E-Government.
2. Pengelolaan website Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi.
3. Penyebaran informasi kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel.
4. Kesenjangan kemampuan TIK Masyarakat.
5. Jaminan keamanan sistem TIK.

Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi dari Kemenkominfo RI tentang TIK.
2. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK.
3. Partisipasi masyarakat pada pelatihan di bidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM.
4. Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat.
5. Penyelenggaraan statistik sektoral.
6. Penerapan fungsi GPR (government public relations).
7. Edukasi internet sehat dan aman, kreatif dan produktif.
8. Sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah.

9. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setuju di dalam pelaksanaan APBD tahun 2023, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun rancangan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kominfo Kabupaten Jombang tahun 2023 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut:

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				11,760,071,639	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12,753,943,859	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,138,905,339	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,209,650,439	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13,437,500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				27,560,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8,730,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11,060,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4,707,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	16,500,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,103,023,704	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,141,765,824	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4,831,480,104	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4,927,422,324	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	266,786,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	209,586,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,757,600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,757,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				259,010,535	Administrasi Umum Perangkat Daerah				373,430,685	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket `Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13,805,635	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13,805,635	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	51,247,200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	65,246,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	82,945,200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	164,383,900	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	51,727,500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	51,753,750	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	11,496,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	11,496,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	47,789,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	66,765,400	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				543,434,600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				535,589,800	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	251,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	251,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	292,434,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	284,589,800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kantor yang Disediakan								
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				219,999,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				227,289,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42,110,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42,110,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	17 Unit	78,150,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	17 Unit	86,550,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50,199,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50,199,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	63 Unit	49,540,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	63 Unit	48,430,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1,983,381,200	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				2,237,677,550	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1,983,381,200	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2,237,677,550	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5 dokumen	375,502,500	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5 dokumen	375,502,500	
	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 dokumen	140,478,700	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 dokumen	160,779,008	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	45 dokumen	1,362,621,000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	45 dokumen	1,596,686,000	
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 unit	104,779,000	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 unit	104,710,042	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				3,637,785,100	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				4,210,611,000	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1,968,740,000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1,951,160,000	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	16,500,000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	16,300,000	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	68 Unit	1,952,240,000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	68 Unit	2,537,938,000	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1,669,045,100	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1,659,445,000	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Egovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan EGovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	211,611,100	Penatalaksanaan dan Pengawasan Egovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan EGovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	211,306,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	785,588,000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	784,941,000	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	671,846,000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	660,125,2000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				345,315,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				331,450,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				345,315,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				331,450,000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				345,315,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				331,450,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	9 Dokumen	245,069,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	9 Dokumen	231,204,000	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	28 Dokumen	100,246,000	Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	28 Dokumen	100,246,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				135,938,900	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				135,938,900	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				135,938,900	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				135,938,900	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				135,938,900	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				135,938,900	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	4 Perangkat Daerah	135,938,900	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	4 Perangkat Daerah	135,938,900	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan kegiatan dilakukan dari bawah dimulai dari Musrenbang tingkat Desa dilanjutkan tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Dalam prosesnya usulan dari desa diakomodir di tingkat kecamatan dan disesuaikan dengan usulan dari masing-masing SKPD yang disampaikan melalui Musrenbang Kecamatan. Hasil Musrenbang pada Dinas Kominfo Untuk tahun 2023 tidak ada usulan dari masyarakat.

BAB III

PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai hubungan nasional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendukung keberhasilan pembangunan Nasional secara keseluruhan. Berdasarkan rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024, tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah. Sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi dan misi RPJMN 2020-2024 VISI : ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Visi dan Misi Kemenkominfo selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, meliputi :

1. Mengoptimalkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur;
2. Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebaran informasi dan pelayanan hubungan komunikasi;

3. Mengoptimalkan regulasi Pengembangan dan Pemanfaatan Smart Province oleh Perangkat Daerah;
4. Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektor yang akurat, akuntabel dan terpercaya;
5. Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Jawa Timur.

VISI Dinas Kominfo Prov. Jawa Timur yaitu : "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong" dan MISI 3 yaitu "Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan"

Misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dengan mengacu misi ke tiga Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu "Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan"

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, implikasi rencana tata ruang dan wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis dapat teridentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Menyebarluaskan informasi dengan memanfaatkan TIK;
2. Mengelola Isu Publik melalui Monitoring Media
3. Mengimplementasikan e-Government / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Pengintegrasian Data Di Seluruh OPD
5. Mewujudkan Satu Data di Jawa Timur

Selanjutnya untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dan dalam rangka mendukung program-program Bupati Kabupaten Jombang, Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada visi dan misi Bupati terpilih.

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan dan menyangkut arah pelaksanaan organisasi pemerintah harus dibawa agar dapat berkarya secara konsisten, antisipasi dan produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh penyelenggara pemerintah. Visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jombang harus dicapai dalam tahun 2023, untuk itu RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 adalah merupakan penjabaran dan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah serta RPJM Nasional. Adapun visi Kabupaten Jombang adalah **“Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing”**.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Jombang tersebut maka ada 3 misi yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional
2. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya
3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri

Dari semua 3 misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam misi Kabupaten Jombang salah satunya yang merupakan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu misi – 1 yaitu Mewujudkan Tata kelola Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.

Berdasarkan 3 misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan visi untuk periode tahun 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”

Rumusan visi tersebut dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :

- *Penyebaran Informasi* memiliki maksud bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika adalah merupakan institusi yang merumuskan, menyusun, memonitoring, mengevaluasi serta memiliki wewenang untuk menyebarluaskan informasi

pembangunan serta kegiatan daerah.

- *Pelayanan publik (public service)* memiliki maksud bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika harus mampu memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*), dan harapan (*expectation*) masyarakat. Dalam hal ini kebutuhan masyarakat yang harus di utamakan dan di penuhi adalah kebutuhan akan keterbukaan dan kemudahan mendapatkan informasi.

Misi adalah merupakan fondasi penyusunan rencana strategis. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi (pelaksana) pemerintah. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka setiap Instansi Pemerintah harus mempunyai misi yang jelas dan sekaligus merupakan persyaratan guna mendapatkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan.

Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika merumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.
2. Mengembangkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Dinas Kominfo Kabupaten Jombang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari Renja Dinas Kominfo Tahun 2023 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Kominfo serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Renja Tahun 2023 Dinas Kominfo yaitu Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika dan Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE.

Sasaran kinerja Dinas Kominfo yang telah direncanakan disusun indikator kinerja dan formulasi perhitungannya. Perhitungan formulasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 FORM TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2018-2023

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran (IKD)	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target Tahun			Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Targe Tahun		
				1	2	3			1	2	3
1	2	3	4	5			6	7	8		
Meningkatkan kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kualitas Layanan Publik bidang Komunikasi dan Informatika	7,69	7,69	7,69	Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	83,5	84	84,5
								Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3,51	3,52	3,53
Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Meningkatnya kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	18 indikator terkelola	2.5	2.63	Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	18 indikator terkelola	2.5	2.63
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	66	73,39	76	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	78	79	80

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan

a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 merupakan bagian dari upaya Pemerintah kabupaten Jombang dalam mencapai target, sasaran pembangunan dan arah kebijakan di tahun 2023 yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Kominfo Tahun 2018-2023. Program pembangunan Dinas Kominfo tahun 2023 pada dasarnya melanjutkan program tahun sebelumnya untuk meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengacu pada Kepmen 050-5889. Karena dalam perkembangannya di pertengahan tahun anggaran Renstra berjalan terdapat perubahan di subkegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selain itu pada tahun ini juga berfokus pada program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adapun faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya :

1. Melaksanakan Visi dan Misi Bupati;
2. Orientasi pada peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas;
3. Melaksanakan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Isu Penting Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo;
4. Meningkatkan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Program dan kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Tahun 2023 antara lain :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika

Indikator Sasaran 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika

Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kota

Indikator Sasaran 2 : Indeks Pelayanan Publik dibidang komunikasi dan informatika

Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

2. Sasaran 2 : Meningkatkan Kematangan Kapabilitas Proses dan Kapabilitas Layanan SPBE

Indikator Sasaran : Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika

Program Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sasaran : Nilai Evaluasi AKIP

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Rekapitulasi Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk kegiatan pembangunan Dinas Kominfo Tahun 2023 dianggarkan dari sumber dana APBD Kabupaten Jombang untuk kegiatan Belanja Langsung sebesar Rp. 13.221.332.759,00 (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dan dilaksanakan melalui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1 Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1 Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.2.3 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.3.1 Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 1.3.2 Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.3.3 Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.3.4 Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.3.5 Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.3.6 Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.4.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.4.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.5.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.5.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.5.3 Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.5.4 Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.7 Program Informasi dan Komunikasi Publik

1.7 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

1.7.1 Subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

1.7.2 Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik

1.7.3 Subkegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan
Kemitraan Komunitas

1.7.4 Sub Kegiatan Penyediaa/Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Informasi dan Komunikasi Punlik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

2. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

2.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

2.1.1 Subkegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain
dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota

2.1.2 Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah
Daerah

2.2 Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

2.2.1 Subkegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota

2.2.2 Subkegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah

2.2.3 Subkegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis
Pemerintahan Berbasis Elektronik

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

3.1.1 Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

3.1.2 Membangun Metadata Statistik Sektoral

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

4.1 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

4.1.1 Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Program dan Kegiatan di Dinas Komunikasi dan Publik tahun 2023 dilaksanakan sebagai berikut :

Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik

- Tersosialisasikannya aplikasi LAPOR SP4N kepada masyarakat;
LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu. LAPOR! dikembangkan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Tujuan sosialisasi LAPOR SP4N untuk memberikan kesempatan pada masyarakat dalam menyampaikan aduan permasalahan atas pelayanan publik. Kegiatan dimaksudkan untuk menjemput informasi atau aduan warga atas pelayanan umum maupun pengaduan warga terhadap fasilitas umum. Selain itu juga mengenalkan pada masyarakat tentang tata cara penyampaian aduan melalui saluran yang benar dan tepat.
- Tersosialisasikan UU informasi publik kepada kepala desa;

PPID yang ada Dinas Kominfo Kabupaten Jombang bertugas mengelola data dan informasi yang dikuasai oleh badan publik. Pengelolaan di sini meliputi pendataan, pengumpulan, pendokumentasian hingga pengarsipan. Selain pengelolaan, PPID juga bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ada dua cara menyampaikan informasi, yaitu pertama dengan cara mengumumkan melalui media yang mudah dijangkau, dan kedua dengan cara memberikannya kepada masyarakat yang melakukan permintaan informasi.

Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Dinas Kominfo Kabupaten Jombang melaksanakan sosialisasi Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui sosialisasi ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- Terlaksananya Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat;
- Terlaksananya pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat kepada pengurus KIM;
- Terlaksananya Warjok lokal (menginformasikan kepada masyarakat kegiatan informasi daerah), bulaga (pelayanan masyarakat) dan publik speaking di sekolah Jombang;

Berdasarkan keterbukaan informasi publik untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui program “Warung Pojok” disingkat Warjok, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mengadakan rutin kegiatan dialog interaktif dan solutif pada setiap bulannya Kegiatan dialog interaktif dan solutif lokal dikemas dalam

perbincangan atau percakapan dengan topik yang dipilih menghadirkan narasumber.

Kegiatan Bupati Layani Warga atau disebut Bulaga merupakan pelayanan gratis kepada masyarakat Diantaranya, berupa cek kesehatan, kemudahan pembayaran pajak serta mendapatkan informasi tentang pajak, pelayanan SIM Keliling dan pembayaran pajak kendaraan, pelayanan warga berupa administrasi kependudukan seperti kartu keluarga, akta kelahiran, KTP Elektronik dsb. Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tupoksi melaksanakan penyebaran diseminasi dan pelayanan IT untuk kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat.

- Penyebarluasan informasi terkait kegiatan Pemerintah Daerah melalui website Jombangkab.go.id dan Kanal resmi media social

Untuk percepatan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait kegiatan dan kebijakan pemerintah, Dinas Kominfo Kabupaten Jombang menyebarluaskan informasi melalui website jombangkab.go.id, Instagram pemkab Jombang dan channel Youtube Kabupaten Jombang.

- Penyebarluasan informasi melalui kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana radio dilakukan melalui radio Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu Suara Jombang FM (SJFM).

Program siaran radio dengan 7 program perhari melalui SJFM meliputi:

**PROGRAM SIAR REGULER
RADIO PUBLIK LOKAL SUARA JOMBANG FM 104,1**

Jam	Nama Program	Format Program	Komposisi
04.00	Opening & Lagu Indonesia Raya	Putar File untuk opening siaran	Pop
04.00-07.00	-Tartil 'Qur'an, Tarhim, Adzan Shubuh -Kajian Islam Pagi Suara Jombang	Putar File Pengajian KH. Djamaluddin Ahmad, Pengasuh Pondok Pesantren Al Muhibbin Tambakberas Jombang	Religi Islami
07.00-08.00	Cakrawala sesi I	INFORMASI Siaran kata; Menghadirkan informasi lokal Jombang (politik, ekonomi, sosial, budaya) ; Mengundang pendengar untuk menyampaikan informasi atau berkomentar baik melalui jalur telepon, WA, atau sms; Konfirmasi dengan narasumber terkait dengan isu lokal yang sedang hangat dibicarakan.	Indonesia pertengahan (rancak)
		1. INFORMASI perbincangan isu nasional	

08.00-10.00	Cakrawala Sesi II	2. TALKSHOW INTERAKTIF Senin : 07.00-08.00 Dinamika Jawa Timur ; Relay Program Asosiasi LPPL Jawa Timur 09.00-09.40 Insidental 10.00-11.00 Nasional Is Me ; Relay Program Asosiasi LPPL, Persada.Id Selasa : 09.00-09.40 Talkshow Anti Hoax (MAFINDO Koord. Jombang) 10.00-10.40 PELESIR ; Talkshow Pariwisata bersama BPPD Kab. Jombang Rabu : 09.00-09.40 Pojok Kesehatan (Dinas Kesehatan Kab. Jombang) 11.00-11.40 Talkshow Covid 19 bersama IDI Kab. Jombang Kamis : 09.00-09.40 Kiat mandiri bersama UMKM dan Enterpreneur Muda Jombang 10.00-11.00 Talkshow Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit KPC PEN; Persada.Id. Jum'at : 09.00-09.40 Halo Anak; BPPKB-PPPA >>> Membuka line telepon, WA atau SMS untuk interaktif pendengar Putar File Berita hasil produksi liputan Tim Reportase	Indonesia Pertengahan (boleh slow)
10.00-12.00	Break In Time	HIBURAN Siaran kata dengan menyisipkan info info ringan seputar lifestyle, selebritis dan info info ringan lainnya. >> Putar Adzan Dhuhur sesuai dengan jadwal waktu Shalat untuk daerah Jombang dan sekitarnya dengan Hot clock yang ditetapkan	Mancanegara Easy Listening (Non Hits)
12.00 – 13.00	Jombang Interaktif	INFORMASI Dibawakan oleh satu orang announcer dibantu oleh dua orang gatekeeper. Menghadirkan tema yang beragam di setiap harinya. Tema diambil dari kebutuhan masyarakat atas informasi maupun pelayanan publik. Nara sumber dihadirkan melalui wawancara telepon dengan announcer. Jumlah nara sumber menyesuaikan dengan kebutuhan pembahasan tema. Nara sumber diambilkan dari OPD terkait atau lembaga-lembaga swasta yang berwenang untuk memberikan klarifikasi atas suatu masalah, atau berwenang untuk memberikan informasi. Nara sumber sudah dipersiapkan sebelumnya untuk bisa standby dalam rentang waktu antara 12.00 s/d 13.00. Program ini mengundang masyarakat untuk berinteraktif melalui dua jalur (telepon dan WA), untuk memberikan laporan keluhan atau komentar atas tema yang dibahas.	Manca – Indo Hits
13.00-15.00	Gayeng Marem	HIBURAN Siaran kata dengan menggunakan bahasa Jawa Jombangan; menemani pendengar beristirahat siang	Gending &

		dengan gending dan campur sari; membuka line interaktif dengan pendengar melalui telepon, WA atau SMS. Informasi terkini lokal/nasional/Internasional (sumber: Detik.com/ Kompas/Liputan6/SS.net ,	Campur Sari
15.00-17.00	DANSA Dangdut Asyik Suara Jombang	HIBURAN Siaran Kata; menemani pendengar beraktifitas santai di sore hari' membuka line interaktif telepon, WA atau SMS	Dangdut Konvensional
17.00-18.00	Jelang Petang	- Putar File Lagu - Putar Adzan Maghrib menyesuaikan dengan jadwal waktu shalat untuk daerah Jombang dan sekitarnya - Putar Murattal	Lagu Religi
18.00-19.00	Senada indonesia POP	HIBURAN Putar File ; segmentasi anak muda; men ghadirkan tangga nada lagu teratas di setiap minggunya;	Lagu Indonesia HITS
19.00-21.00	Goyang Dangdut Malam	HIBURAN Siaran Kata; menemani pendengar beristirahat di malam hari; membuka line interaktif telepon, WA atau SMS	Dangdut Koplo Terbaru
21.00 – 22.00	Muaik Ingat-Ingat	HIBURAN Putar File ; segmentasi dewasa; men ghadirkan lagu oldies Indonesia; Pengantar istirahat malam	Lagu oldies Indonesia era 70-80an
22.00-23.00	Ngakak Bareng Kartolo	Putar File Senin – Rabu, Jum'at : Lawakan Kartolo Kamis : Shalawat Minggu : Wayang Kulit	-
23.00	Closing & Lagu Wajib Nasional	Putar file lagu untuk closing siaran	
Program PERNIK			
Menit ke-00 02 15 30 45	Update Info Covid 19 Informasi Hoax Lintas Informasi Lokal Info Korupsi KPK Lintas Informasi Nasional	Putar File yang diproduksi dan ready setiap hari	-

Bidang Aplikasi Teknologi Informasi

- Penyediaan jaringan FO untuk OPD perkotaan maupun jaringan wireless kecamatan untuk meningkatkan kapasitas jaringan internet 306 desa/kelurahan guna fasilitasi digitalisasi desa;
- Pembangunan jaringan FO untuk seluruh OPD milik Pemkab, untuk meningkatkan legalitas penggunaan FO;

- Peningkatan kapasitas jaringan wireless (penggantian perangkat) pada 21 kecamatan dan repeater untuk meningkatkan kapasitas jaringan internet 306 desa/kelurahan guna fasilitasi digitalisasi desa;
- Bandwidth 1 GB untuk OPD;
- Penyediaan ruang server yang sesuai dengan standart SNI untuk fasilitasi hosting aplikasi pemerintah;
- Integrasi aplikasi pemerintahan dan layanan umum;
- Pengembangan dan pembangunan aplikasi baru untuk mendukung layanan pemerintahan dan layanan umum sebagaimana diamanatkan dalam perpres SPBE.

Bidang Statistik

- Mendorong OPD untuk update data sectoral secara berkala melalui portal satu data Kabupaten Jombang (satudata.jombangkab.go.id);
Portal Satu data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, dan interoperabilitas data. Untuk memudahkan OPD dalam menginput data, dan memudahkan pengguna data untuk memperoleh data. Dinas Kominfo pada saat ini telah membangun aplikasi Portal Satu Data dan MOU dengan BPS Jombang dalam kemudahan pemenuhan data statistik.
- Sistem elektronik yang dilakukan pengamanan informasi

Rincian total kebutuhan dana/pagu indikatif progam dan kegiatan usulan tahun 2023 ditampilkan dalam tabel berikut:

TABEL 3.1
PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF
PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023		Realisasi Triwulan II program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023 (tgl 30 Juni 2023)		Usulan Perubahan Target dan Anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/ (Berkurang)	Alasan Usulan Naik/Turun
					K	A	K	A	K	A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%		6.305.655.309		3,068,051,651		7.276.209.962	970.554.653	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%		27,560,000		11,344,000		27,560,000	0	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	2 dok		11,060,000		1,500,000		11,060,000	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 lap	2 lap		16,500,000		9,844,000		16,500,000	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100%	100%		5,141,765,824		2,591,306,510		5.125.385.824	(16.380.000)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang	33 orang		4,927,422,324		2,501,252,760		4,927,422,324	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023		Realisasi Triwulan II program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023 (tgl 30 Juni 2023)		Usulan Perubahan Target dan Anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/ (Berkurang)	Alasan Usulan Naik/Turun
					K	A	K	A	K	A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dok	2 dok		209,586,000		87,778,000		193,206,000	(16.380.000)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	0		4,757,500		2,275,750		4,757,500	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		373,450,685		95,805,281		392.868.885	19.418.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	6 paket		13,805,635		360,000		13,805,635	0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	6 paket		65,246,000		23,434,360		58.219.600	(7.026.400)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket		164,383,900		40,312,150		163.279.400	(1.104.500)	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5 paket		51,753,750		13.066.906		48.520.850	(3.232.900)	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dok	3 dok		11,496,000		2,520,000		11.496.000	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	5 lap	2 lap		66,756,400		16,111,871		97.547.400	30.782.000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023		Realisasi Triwulan II program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023 (tgl 30 Juni 2023)		Usulan Perubahan Target dan Anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/ (Berkurang)	Alasan Usulan Naik/Turun
					K	A	K	A	K	A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Konsultasi SKPD										
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%		535,589,800		273,223,340		613,007,300	77.417.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	6 lap		251,000,000		147,628,472		325.000.000	74.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	6 lap		284,589,800		125,594,868		288.007.300	3.417.500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%		227,289,000		96,372,520		1.117.387.953	890.098.953	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit		42,110,000		32,457,500		42,110,000	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	17 unit	17 unit		86,550,000		21,777,900		120,150,000	33,600,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit		50,199,000		45,375,620		517,365,502	467,166,202	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	63 unit	63 unit		48,430,000		22,243,500		437,762,751	389,332,751	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023		Realisasi Triwulan II program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023 (tgl 30 Juni 2023)		Usulan Perubahan Target dan Anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/ (Berkurang)	Alasan Usulan Naik/Turun
					K	A	K	A	K	A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	63 (sedang)	0		2,237,677,550				3,003,861,050	766,183,500	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di	84,5 (baik)	0								
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	3,2%	0		2,237,677,550		1,430,207,000		3,003,861,050	766,183,500	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5 dok	5 dok		375,502,500		255,155,500		698,967,500	323,465,000	
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 dok	0		160,779,008		38,870,500		173,377,708	12,598,700	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	45 dok	45 dok		1,596,686,000		1,049,486,000		2,008,730,600	412,044,600	
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 unit	0		104,710,042		86,695,000		122,785,242	18,075,200	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023		Realisasi Triwulan II program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023 (tgl 30 Juni 2023)		Usulan Perubahan Target dan Anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/ (Berkurang)	Alasan Usulan Naik/Turun
					K	A	K	A	K	A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Level 2	0		4,210,611,000		1,126,180,496		3,893,911,000	(316,700,000)	
		Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	18 indikator terkelola	0								
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar	100%	100%		2,554,238,000		820,132,245		2,495,938,000	(58,300,000)	
		Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain	100%	100%								
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 dok	2 dok		16,300,000		0		16,300,000	0	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	68 unit	68u nit		2,537,938,000		2,0007,400,000		2,479,638,000	(58,300,000)	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	20%	20%		1,656,373,000		306,048,251		13,97,973,000	0	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan	1 dok	0		211,306,800		4,550,000		2,479,638,000	(58,300,000)	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023		Realisasi Triwulan II program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023 (tgl 30 Juni 2023)		Usulan Perubahan Target dan Anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/ (Berkurang)	Alasan Usulan Naik/Turun
					K	A	K	A	K	A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Egovernmentdalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan EGovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 unit	1 unit		784,941,000		174,254,864		495,241,000	(289,700,000)	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	2 unit	0		660,125,200		449,690,000		631,625,200	(28,500,000)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	100%	100%		331,450,000		64,650,000		442,623,750	111,173,750	
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3,53	0								
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang	3 dok	2 dok		331,450,000		64,650,000		442,623,750	111,173,750	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	9 dok	6 dok		231,204,000		188,279,000		231,204,000	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023		Realisasi Triwulan II program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023 (tgl 30 Juni 2023)		Usulan Perubahan Target dan Anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/ (Berkurang)	Alasan Usulan Naik/Turun
					K	A	K	A	K	A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Statistik Sektoral										
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	28 dok	28 dok		100,246,000		4,700,000		211,419,750	111,173,750	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	100%	100%		135,938,900		17,706,118		235,438,800	99,499,900	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi	100%	100%		135,938,900		17,706,118		235,438,800	99,499,900	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah		135,938,900		17,706,118		235,438,800	99,499,900	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang pada tahun 2023 dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mewujudkan *Good Governance*.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran Dinas Kominfo Kabupaten Jombang untuk melakukan pengelolaan dan penataan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Jombang, maka secara terus menerus perlu dilakukankajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi berbagai perubahan/dinamika yang terjadi. Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Kominfo ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik.

Jombang, 2 Agustus 2023

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG**



IDA KHUMAIDA, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 197407271993022003